

Laporan Studi Lapangan

# **Pulau Serangan: Dampak Pembangunan pada Lingkungan dan Masyarakat**

Oleh: Lisa Woinarski



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

kerja sama dengan

AUSTRALIAN CONSORTIUM FOR IN-COUNTRY

INDONESIAN STUDIES

**2002**

"Nasi yang sudah menjadi bubur tidak bisa dijadikan nasi lagi, tapi buburnya bisa dikasih gula supaya menjadi lebih enak."

Wayan Raga, Bendesa Adat Pulau Serangan

## KATA PENGANTAR

Selama 'magang' di Lembaga Swadaya Masyarakat di Bali, namanya Yayasan Bahtera Nusantara, penulis menjadi tertarik dalam kasus Pulau Serangan. Oleh karena itu, penulis menjadikan topik tersebut untuk dikaji dan ditulis dalam laporan 'Studi Lapangan' untuk memenuhi syarat Program ACICIS (Australian Consortium for In-Country Indonesian Studies) di Fakultas FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Penelitian ini dilakukan selama bulan Agustus sampai Oktober tahun 2002 di lapangan, ketika tiba-tiba semua mahasiswa harus pulang ke Australia karena alasan keamanan. Akan tetapi, dengan materi yang dikumpulkan di lapangan, penulisan laporan berlangsung di Australia.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada penduduk Pulau Serangan yang diwawancarai, khususnya Wayan Patut. Semoga buburnya segera dikasih gula. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua karyawan di Yayasan Bahtera Nusantara untuk memperkenalkan penulis dengan topik ini, dan untuk pengalaman dan perkembangan ide-ide selama 'magang' di sana.

Topik ini sangat mengesankan penulis, yang sangat mengharapkan perbaikan keadaan yang sedang ada di Pulau Serangan untuk menguntungkan masyarakat. Penulis mengakui bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun selalu penulis perlukan. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Lisa Woinarski

Canberra, Australia  
Pebruari, 2003

# DAFTAR ISI

Halaman:

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAKSI</b> .....	v
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Definisi Istilah .....	5
1.5 Metode Penelitian.....	6
<b>BAB II: DAMPAK LINGKUNGAN</b> .....	7
2.1 Pendahuluan.....	7
2.2 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.....	8
2.3 Perubahan Arus Laut.....	9
2.4 Kehilangan Ekosistem Penting.....	10
2.5 Kehilangan Penyu.....	12
<b>BAB III: DAMPAK SOSIAL BUDAYA</b> .....	14
3.1 Pendahuluan.....	14
3.2 Pelanggaran HAM – Pembebasan Tanah.....	14
3.3 Gangguan Terhadap Kesucian Pura.....	16
3.4 Kebudayaan dan Lahan.....	17
3.5 Perubahan Kebudayaan.....	19
3.6 Konflik Masyarakat.....	20
3.7 Isolisasi Masyarakat.....	22
<b>BAB IV: DAMPAK EKONOMI</b> .....	23
4.1 Pendahuluan.....	23
4.2 Kerugian Masyarakat.....	24
4.3 Nelayan.....	24
4.4 Penambang.....	26
4.5 Kafe dan Kiosk.....	26
4.6 Penambangan Karang.....	27
<b>BAB V: SOLUSI UNTUK MASA DEPAN</b> .....	28
5.1 Pendahuluan .....	28
5.2 Sikap Masyarakat Terhadap Proyek BTID.....	29
5.3 Solusi Lingkungan.....	29
5.4 Solusi Sosial Budaya.....	30
5.5 Solusi Ekonomi.....	31

<b>BAB VI: PENUTUP.....</b>	<b>33</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>34</b>

## ABSTRAKSI

### **Pendahuluan**

Secara geografis, Pulau Serangan terletak di Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali. Luasnya Pulau Serangan asli merupakan 111,9 ha. Desa Serangan terdiri dari enam banjar dan satu kampung. Jumlah jiwa di Pulau Serangan mencapai 3253 orang. 85% penduduk bekerja sebagai nelayan.

Sejak tahun 70-an ada industri pariwisata di Pulau Serangan, namun pada awal tahun 90-an, kelompok investor mau membangun resort, namanya Bali Turtle Island Development (BTID). Pembebasan tanah masyarakat dilaksanakan, BTID melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dan pengerukan dan penimbunan mulai untuk menambah luasan lahan Serangan hampir 4 kali lipat. Namun, dengan adanya proyek BTID menimbulkan permasalahan bagi lingkungan dan masyarakat Pulau Serangan. Permasalahan utama merupakan kehilangan mata pencaharian untuk masyarakat akibat kerusakan lingkungan dan penimbunan yang dilakukan BTID. Akhirnya, proyek BTID terpaksa berhenti karena kesulitan dana akibat krisis moneter pada tahun 1998 dan sampai sekarang tidak ada investor baru, supaya lahan BTID 'kosong'.

### **Dampak Lingkungan**

Walaupun BTID melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang disetujui oleh Gubernur Bali pada tahun 1995, kerusakan lingkungan masih muncul akibat proyek BTID. Perubahan arus laut terjadi sekitar Pulau Serangan, diakibatkan pengerukan dan penimbunan proyek, yang menyebabkan abrasi pantai di beberapa lokasi dan penumpukan lumpur dan sampah di sebelah barat Pulau Serangan. Selain itu, proyek BTID berdampak pada ekosistem penting seperti hutan bakau, terumbu karang, dan padang rumput laut, yang semuanya hilang atau sedang dalam keadaan buruk akibat proyek BTID.

### **Dampak Sosial Budaya**

Proyek BTID berdampak pada 'kain sosial'. Penduduk Serangan mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia – tanahnya dibebaskan oleh pihak militer dengan cara intimidasi, dan dengan ganti rugi yang tidak wajar. Di samping itu, kesucian lahan dan pura Pulau Serangan, termasuk Pura Sakenan, dinilai 'diganggu' oleh proyek BTID. 'Kain sosial' Serangan berubah secara drastis dengan kehilangan 'budaya nelayan' Serangan, yang diperparahkan karena budaya baru susah dicari untuk penduduk ini yang pada umumnya kurang berpendidikan. Juga, proyek juga menyebabkan konflik

dalam masyarakat Serangan, yang dulu relatif tentram, dengan demikian merusak persatuan masyarakat Serangan.

### **Dampak Ekonomi**

Walaupun BTID menjanjikan ekonomi masyarakat Serangan akan meningkat akibat proyek, yang terjadi adalah penurunan ekonomi Serangan. Selain 150 warga Serangan yang nanti di-PHK, kebanyakan penduduk tidak dapat pekerjaan dalam proyek BTID, dan mata pencahariannya sebagai nelayan hilang karena penimbunan di dataran pasang surut dan kerusakan lingkungan lain, maka mereka sedang mengalami kesusahan dalam aspek ekonomi kehidupannya. Menurut salah satu penduduk Serangan, kerugian masyarakat sudah mencapai Rp8.829.250.000 per tahun. Akibatnya, beberapa penduduk Serangan sudah mencari sumber nafkah lain, misalnya, penduduk yang terpaksa menambang untuk menghidupi keluarganya karena ikan sudah hilang.

### **Solusi Untuk Masa Depan**

Sekarang proyek BTID berhenti karena kekurangan dana, sementara kerusakan lingkungan dan kesusahan penduduk dalam hidupnya berlangsung. Solusi untuk permasalahan yang muncul akibat BTID harus ditemui, dan beberapa diajukan dalam bab ini.

### **Penutup**

Sampai sekarang, proyek BTID menimbulkan lebih banyak permasalahan daripada pemanfaatan untuk masyarakat Serangan. Ada kerusakan lingkungan, yang menyebabkan kehilangan mata pencaharian untuk 85% penduduk yang merupakan nelayan pesisir. Ada pelanggaran HAM, 'kain sosial' telah berubah, dan penduduk Serangan mengalami kerugian besar. Permasalahan ini berlangsung, walaupun proyek BTID berhenti. Beberapa solusi telah diajukan, namun pada dasarnya BTID yang harus bertanggungjawab, dan masyarakat harus diperankan dulu.

## Bab I: Pendahuluan

---

### 1.1 Latar Belakang

Secara geografis, Pulau Serangan terletak di Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali. Luasnya Pulau Serangan asli merupakan 111,9 ha yang dulu terdiri dari 6,456 ha lahan pemukiman, 85 ha tegalan dan perkebunan, dan 19 ha rawa atau hutan.<sup>1</sup> Desa Serangan terdiri dari enam banjar, yaitu Banjar Ponjok, Kaja, Tengah, Kawan, Peken, dan Dukuh, dan Kampung Bugis.

Jumlah jiwa di Pulau Serangan mencapai 752 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah jiwa 3253 orang.<sup>2</sup> 85% penduduk bekerja sebagai nelayan pesisir (yang mencari hasil laut di dataran pasang surut atau memakai perahu tradisional tanpa mesin), dan yang lainnya merupakan karyawan.<sup>3</sup> Dengan demikian, penduduk Serangan mempunyai identitas sebagai orang pesisir, yang tidak biasa di Bali yang mana kebanyakan orang Bali berorientasi terhadap tanah.<sup>4</sup> Desa Serangan terdiri dari penduduk Hindu dan Muslim. Orang Muslim ini sudah tinggal di Pulau Serangan berabad-abad, kebanyakannya adalah keturunan orang Bugis dari Sulawesi Selatan yang datang ke pulau Bali pada abad ke-17.<sup>5</sup>

Sejak tahun 70-an industri pariwisata ada di Pulau Serangan, dengan turis yang datang untuk melihat penyu. Namun, pada akhir tahun 80-an, industri pariwisata itu berkembang ketika sekelompok investor mau membangun resort di Serangan, namanya Bali Turtle Island Development (BTID). Kepemilikan BTID sekarang kurang jelas, tetapi pada awalnya proyek dimiliki Grop Bimantara, yang dipimpin oleh Bambang Trihatmojo, anak mantan Presiden Suharto, serta saudaranya Tommy Suharto dan PT. Pembangunan Kartika Udayana, yang dimiliki Komando Daerah Militer (Kodam) IX Udayana.<sup>6</sup> Akan tetapi, sebelum BTID muncul sebagai pembangun, pihak dari Kodam sudah mengajukan surat permohonan kepada Gubernur Bali untuk melakukan "Pelestarian dan Pengembangan Pariwisata di Pulau Serangan" pada

---

<sup>1</sup> Monografi Kelurahan Serangan, 1994.

<sup>2</sup> Monografi Kelurahan Serangan, Agustus 2002.

<sup>3</sup> Wayan Patut, 14/9/02.

<sup>4</sup> Vickers, A. dan Suwitha, P. G., 1992. "Serangan Island and Benoa Bay: A Cultural, Social and Economic Description". Illawara Technology Corporation, University of Wollongong, hal. 17.

<sup>5</sup> Ibid., hal. 5.

<sup>6</sup> Aditjondro, G. 1995, Bali, Jakarta's Colony: Social and Ecological Impacts of Jakarta-Based Conglomerates in Bali's Tourism Industry. Working Paper No. 58, Asia Research Centre on Social, Political dan Economic Change, Murdoch University, Perth. Juga melihat "Keluarga Cendana Diminta Melepas Saham", Tempo, 11/7/00.



bulan Januari 1990.<sup>7</sup> Sasaran proyek itu adalah “menyelamatkan kondisi fisik Pulau Serangan dari kerusakan lebih parah, peningkatan sosial ekonomi penduduk, pelestarian peninggalan budaya dan peningkatan apresiasi budaya”.<sup>8</sup> Mereka diberikan ijin prinsip oleh Gubernur Bali.

Kemudian, Panitia Pembebasan Tanah melaksanakan pembebasan tanah di Pulau Serangan untuk mendapat tanah untuk pembangunan selama delapan tahapan, dari Juli 1990 sampai April 1991. Setelah itu, ijin prinsip diberikan kepada BTID guna pengajuan permohonan Hak Guna Bangunan, yang diberikan kepada BTID dalam Surat Keputusan Gubernur Bali, tanggal 24 Desember 1992. BTID kemudian mengadakan penelitian untuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), yang disetujui oleh Gubernur Bali pada tahun 1995. Akhirnya, BTID diberikan Ijin Kerja Keruk dan Reklamasi disekitar Pulau Serangan pada bulan Juli 1996 oleh Departmen Perhubungan.

Proyek yang direncanakan BTID adalah untuk membangun lapangan golf, resort, lagoon untuk sarana rekreasi air, yacht club, beach club house, pembangunan Superlot yang berupa villa, fasilitas penunjang pariwisata lainnya, serta marina/ferry dan jembatan penyeberangan dari daratan pulau Bali ke Pulau Serangan. Selain itu, supaya proyek BTID lebih menarik masyarakat Bali dan Serangan, ada rencana untuk membangun pusat penelitian penyu dan bakau, kiosk dan restoran, serta perbaikan fasilitas pemukiman masyarakat seperti sarana air, listrik, wc umum dan lain-lainnya.<sup>9</sup> Proyek itu “memanfaatkan lahan Pulau Serangan sekitar 112 ha”, yang sebenarnya seluruh wilayah pulau asli, dan di samping itu melakukan pengerukan dan penimbunan (reklamasi) pantai, “sehingga luas lahan keseluruhan yang akan dikembangkan sehingga mencapai kurang lebih 491 Ha”, atau hampir 4 kali lipat luasan pulau asli.<sup>10</sup>

Dengan adanya proyek BTID menimbulkan permasalahan bagi lingkungan dan masyarakat Pulau Serangan. Permasalahan utama merupakan kerusakan lingkungan akibat pembangunan BTID yang telah mengakibatkan kehilangan mata pencaharian untuk kebanyakan masyarakat. Permasalahan justru timbul untuk masyarakat setempat akibat pembangunan, akan tetapi, permasalahan tersebut harus disosialisasikan terhadap masyarakat. *Feasibility Study* untuk proyek BTID, yang

---

<sup>7</sup> Kodam IX Udayana, Januari 1990. “Pokok-Pokok Pikiran Proyek Pelestarian dan Pengembangan Pariwisata Pulau Serangan”. Denpasar.

<sup>8</sup> Ibid., hal. 1-2.

<sup>9</sup> Lembaga Penelitian Universitas Udayana (LPUU), 1995. “Analisis Dampak Lingkungan (Andal) Pengembangan Pulau Serangan”. Denpasar, hal. 1 – 5.

dilakukan konsultan luar negeri, menegaskan bahwa “proses Amdal tidak hanya prosedur dokumentasi proyek, tapi juga proses demokratis di mana masyarakat meninjau rencana dan menyetujui, merubahkan atau menolak rencana itu”.<sup>11</sup> Akan tetapi, dalam kasus Serangan, kebanyakan masyarakat tidak tahu rencana BTID, dan sama sekali tidak ada masukan. Masyarakat baru tahu adanya proyek selama tahap pembebasan tanah, dan rencana reklamasi hanya muncul setelah reklamasi tersebut berjalan pada tahun 1996. Saat pra-konstruksi memang dilakukan sosialisasi, dan penduduk Serangan dijanjikan bahwa kehidupan mereka akan sejahtera dengan adanya proyek, dengan kesempatan pekerjaan baru, dan fasilitas desa lengkap. Akibat sosialisasi itu dengan janji yang akan menguntungkan masyarakat Serangan, pada dasarnya mereka setuju dengan proyek (dilihat dalam hasil survei Andal yang menunjukkan bahwa 6,73% sangat setuju dan 69,23% setuju).<sup>12</sup> Namun, sekarang dikatakan bahwa kalau penduduk Serangan mengetahui dampak proyek pada lingkungan dan masyarakatnya sepenuhnya pada saat sosialisasi, mungkin mereka tidak akan setuju dengan proyek. Akan tetapi, dikatakan situasi pada saat akhir Orde Baru itu tidak memungkinkan masyarakat untuk melawan.<sup>13</sup>

Proyek BTID terpaksa berhenti karena kondisi politik serta kesulitan dana akibat krisis moneter pada tahun 1998,<sup>14</sup> dengan mencapai 60% dari rencana pengerukan dan reklamasi.<sup>15</sup> Sampai sekarang, tidak ada investor baru, dan lahan BTID ‘kosong’. Namun, permasalahan lingkungan dan bagi masyarakat Serangan terus terjadi dan semakin diperparah lagi. Oleh karena itu, masyarakat Serangan membentuk Tim 18, yang anggotanya diambil dari tokoh-tokoh masyarakat untuk mewakilinya dalam mengadakan kesepakatan dengan BTID. Pada tanggal 14 Oktober 1998 kesepakatan, atau *Memorandum of Understanding (MoU)*, dibentuk, yang mewajibkan BTID melakukan beberapa hal-hal yang akan menguntungkan penduduk Serangan. Namun, sampai sekarang hanya dua pasal yang terpenuhi karena tidak dicantumkan waktu perlakuan dan pengakhiran, dan sanksi-sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Juga, beberapa butir dalam *MoU* benar-benar menempatkan masyarakat dalam posisi lemah, misalnya pasal 9, yang menyebutkan bahwa masyarakat Serangan harus

---

<sup>10</sup> Ibid., hal. I - 5.

<sup>11</sup> LeProvost Dames and Moore, Agustus 1994, “PT. BTID Serangan Island Feasibility Study Internal Assessment of Concept Plan 3C”. Perth, Australia, hal. 13.

<sup>12</sup> LPUU, 1995, *op cit.*, hal. IV – 149.

<sup>13</sup> Wayan Patut, 14/9/02.

<sup>14</sup> “Hendro Tak Berani Beri Kepastian”, *Bali Post*, 16/9/98.

<sup>15</sup> PT. BTID, 4 September 1998. “Presentasi di Rapat Pembahasan Pelaksanaan Amdal Pengembangan Pulau Serangan”. Kantor Bappeda Kodya Denpasar, Bali.

mendukung proyek BTID, dan juga menjaga dan mengamankan proyek, maka akhirnya kesepakatan itu tidak menguntungkan masyarakat Serangan.<sup>16</sup>

Masalah Pulau Serangan berlangsung, dan Pemerintah Daerah Bali membentuk Panitia Khusus (Pansus) evaluasi proyek BTID untuk mengetahui sejauhmana keberadaan proyek-proyek BTID di Pulau Serangan. Setelah memperoleh informasi awal dari masyarakat, pakar lingkungan, dan tokoh lainnya, DPRD Bali mendengar langsung masukan sekaligus keluhan dari masyarakat soal kelangsungan megaprojek bersangkutan.<sup>17</sup> Penduduk Serangan menunjukkan dukungannya untuk kelanjutan proyek. Sebenarnya mereka agak fatalistik, misalnya, dalam wawancara Bendesa Adat mengatakan bahwa “nasi yang sudah menjadi bubur tidak bisa dijadikan nasi lagi, tapi buburnya bisa dikasih gula supaya menjadi lebih enak.” Pulau Serangan sudah dikembangkan yang tidak bisa dikembalikan, tetapi bisa ‘dikasih gula’, yaitu masyarakat menunggu pemanfaatan proyek BTID. Akhirnya, Pansus mengeluarkan rekomendasi yang intinya menyetujui proyek BTID itu dilanjutkan, tertanggal 15 Mei 2001,<sup>18</sup> tetapi sampai sekarang proyek BTID belum dijalankan lagi.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, pokok permasalahan dari studi lapangan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Bagaimana dampak proyek BTID pada baik lingkungan maupun sosial budaya dan ekonomi masyarakat Serangan?
- Apakah ada solusi untuk permasalahan yang diakibatkan proyek BTID?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak-dampak proyek BTID pada lingkungan dan masyarakat Serangan supaya dapat diperoleh solusi untuk masa depan Pulau Serangan.

## 1.4 Definisi Istilah

DPRD – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Proyek BTID – proyek ‘Pelestarian dan Pengembangan Pulau Serangan’ oleh PT. Bali Turtle Island Development.

<sup>16</sup> “Perjanjian Antara PT. Bali Turtle Island Development Dengan Masyarakat Kelurahan Serangan”, Nomor 046/BTID-MOU/1998, 14 Oktober 1998.

<sup>17</sup> “DPRD Bali Bentuk Pansus Evaluasi Proyek BTID”, Nusa Tenggara, 13/4/00.

<sup>18</sup> “Akhirnya, DPRD Bali Keluarkan Rekomendasi”, Bali Post, 17/5/01.

### **1.5 Metodologi Penelitian**

Untuk mendapatkan data tentang dampak proyek BTID pada lingkungan dan masyarakat Pulau Serangan, pendekatan kualitatif digunakan. Pendekatan tersebut dilakukan dengan metode wawancara dengan cara sampel purposif, yaitu responden yang diwawancarai mewakili kelompok-kelompok tertentu di masyarakat (misalnya tokoh masyarakat seperti Bendesa Adat, tokoh agama seperti pemangku, tokoh pemuda, kelompok nelayan), dan juga pakar dari Universitas atau Lembaga Swadaya Masyarakat, untuk mencerminkan pendapat atau keadaan yang luas. Wawancara berkisar antara percakapan non-formal sampai wawancara formal pada waktu yang tepat. Selain wawancara, penelitian ini juga berdasarkan pengalaman dan observasi penulis di Pulau Serangan selama dua bulan (September sampai Oktober 2002). Informasi umum diperoleh dari literatur tertulis dan artikel-artikel surat kabar. Selain itu, dokumen-dokumen tentang proyek BTID diperoleh dari berbagai sumber.

## Bab II: Dampak Lingkungan

---

### 2.1 Pendahuluan

Menurut suatu warga Serangan, “sebelum reklamasi kekayaan alam di sini paling kaya”, akan tetapi, “sekarang mati semuanya”.<sup>19</sup> Memang, daerah pesisir Pulau Serangan sudah dimasukkan golongan ‘pesisir mengalami stres’ oleh tim peneliti dari Kanada.<sup>20</sup> Cerita dari masyarakat mendukung pernyataan ini. Penduduk yang diwawancarai setuju bahwa sekarang lingkungan Serangan rusak akibat proyek BTID. Menurutnya, di laut ikan kurang, dan kepiting, udang dan cumi-cumi sama sekali tidak ada di dataran pasang surut; masih ada karang, tetapi agak rusak; rumput laut yang dulu ada banyak hampir hilang; dan jalan air berubah dekat pulau karena kedalaman yang dulu rata-rata 3m sekarang 10m. Di daratan, pohon-pohon yang dulu banyak, termasuk pohon kelapa dan hutan bakau, sekarang kurang dan kondisinya sakit. Dewasa ini, suhu udara lebih panas, dan ada lebih banyak penyakit-penyakit akibat debu. Dulu jarang ada orang yang memakai kaca mata, sekarang ada banyak akibat debu dan sinar terang dari tanah kapur (hasil pengerukan) itu.

### 2.2 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)

BTID mengadakan penelitian ke lapangan beserta konsultan lingkungan Lembaga Penelitian Universitas Udayana (Unud) dari bulan April hingga Juli 1995 untuk Amdal, sesuai PP No. 51 Tahun 1993 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Pedoman Pelaksananya. Sebelum itu, konsultan dari Australia menulis laporan *Feasibility Study* yang menilai proyek BTID “rumit dan ambisius”, dan menguraikan pembatas yang mungkin akan terjadi yang perlu diputuskan dengan kajian lebih lanjut.<sup>21</sup> Akan tetapi, dalam Andal BTID, kelihatan rekomendasi ini tidak dilakukan. Misalnya, *Feasibility Study* merekomendasi bahwa rencana reklamasi yang berdampak pada terumbu karang dan padang rumput laut di bagian selatan Pulau Serangan (yang disebut luar biasa di Bali karena dalam keadaan yang relatif asli) seharusnya dipindahkan supaya habitat ini tidak hilang.<sup>22</sup> Namun, penimbunan masih terjadi di tempat itu, merusakkan habitat itu. Kontrak dengan konsultan ini akhirnya diputuskan,

---

<sup>19</sup> Arya Widana, 15/9/02.

<sup>20</sup> Knight, D., Sastrawan, P., dan Suarnatha, M., “Systems Approaches for Integrated Coastal Zone Management”. Dalam Martopo, S. dan Mitchell, B., 1995. “Bali: Balancing Environment, Economy and Culture”. Ontario, Canada: University of Waterloo Department of Geography Publication Series, hal. 266.

<sup>21</sup> LeProvost Dames and Moore, 1994, *op cit.*, hal. 15.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 13-14.

disebut karena tidak 'ramah BTID'.<sup>23</sup> Amdal Pembangunan Pulau Serangan disetujui oleh Gubernur Bali pada tahun 1995.

Pada tahun 1998 ada debat yang muncul dalam pers regional Bali, akibat tudingan tim Amdal Unud tidak profesional. Tudingan ini muncul karena kerusakan lingkungan yang terjadi akibat proyek-proyek 'raksasa' seperti proyek BTID, yang Amdalnya dilakukan tim Unud. Amdal BTID disebut "pemanis administrasi" saja.<sup>24</sup> Dosen dari Unud membantah tudingan ini dan mengatakan bahwa yang diprotes adalah kegiatan pemrakarsa daripada hasil studi. Kegiatan pemrakarsa sebenarnya wajib dipantau oleh instansi yang terkait, sesuai dokumen Amdal Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), dan di kasus BTID, pemerintah yang bertanggungjawab.<sup>25</sup> Akan tetapi, selain kekurangan dana untuk melakukan pemantauan rutin dan mendalam, pihak pemerintah mempunyai pendapat yang bermasalah untuk pelestarian lingkungan, misalnya: "Proyeknya belum selesai, jadi kita tidak tahu apa saja yang dilanggar."<sup>26</sup>

Salah satu pelanggaran Amdal yang dampak lingkungannya sangat parah merupakan jembatan di jalan penyeberangan. Pada waktu keberhentian proyek, jembatan belum dibangun sesuai Amdal. Jalan tersebut merupakan tembok dari daratan Bali ke Pulau Serangan, dan menyebabkan abrasi pantai di beberapa tempat di sekitar kawasan proyek. Tokoh lingkungan di masyarakat banyak melobi pemerintah daerah, yang akhirnya menuntut bahwa jembatan itu dibangun, panjangnya minimal 100m, walaupun pengamat lingkungan mengusulkan bahwa jembatan itu seharusnya dibuat sepanjang 200 sampai 300m sesuai dengan lebar selat asli supaya sirkulasi arus lancar.<sup>27</sup> BTID menegaskan bahwa pihaknya akan mulai membangun jembatan itu pada bulan Maret 2000,<sup>28</sup> dengan panjang lebar 100 x 26,5m, akan tetapi, jembatan itu hanya diselesaikan pada pertengahan tahun 2001. Sekarang, walaupun ada jembatan, abrasi pantai masih terjadi akibat proyek BTID, mengingatkan bahwa dalam rencana Kodam pertama salah satu tujuan pembangunan adalah menyelamatkan kondisi fisik Pulau Serangan dari abrasi.

---

<sup>23</sup> Made Mangku, 9/8/02.

<sup>24</sup> "Pembuat Amdal Harus Bertanggungjawab", Bali Post, 6/5/00.

<sup>25</sup> "NBR dan BTID Langgar Amdal", Bali Post, 7/8/98.

<sup>26</sup> Arsana, Wali Kota Madya Denpasar. Dalam "Arsana: Sedang Negosiasi", Bali Post, 25/8/98).

<sup>27</sup> "Jembatan BTID Diusulkan 200 Meter", DenPost, 6/5/00.

<sup>28</sup> Surat BTID 141/BTID-1/Dirut-BG/20 kepada Gubernur Bali, perihal realisasi pembangunan jembatan ke Pulau Serangan. Jakarta, tertanggal 22 Maret 2000.

### 2.3 Perubahan Arus Laut

Pengerukan dan penimbunan Pulau Serangan sudah menyebabkan perubahan arus laut sekitarnya. Walaupun pengembangan Pulau Serangan disebut “aman terhadap pengaruh arus dan gelombang” karena telah diuji melalui *Modelling Test* oleh konsultan Australia,<sup>29</sup> kegiatan pengerukan dan penimbunan BTID belum dipantau untuk mengecek kalau sesuai Amdal. Kalau hasil ‘aman’ *Modelling Test* itu memang benar, maka BTID sudah melanggar Amdal, karena sekitar Pulau Serangan sudah terjadi abrasi pantai. Menurut pakar lingkungan Made Mangku, di sebelah selatan pulau, arus dari laut lepas masuk Teluk Benoa, dan dipercepatkan dan diperkuatkan karena kegiatan reklamasi menyempitkan jarak antara Tanjung Benoa dan Pulau Serangan. Akibatnya, arus ini menyebabkan abrasi di sebelah Tanjung Benoa, yang merupakan sebelah yang lebih lemah karena sebelah Serangan diperkuatkan oleh reklamasi, dan dengan mengurangkan pantai dari 100m sampai 50m, sudah mengancam 3 tempat ibadah.<sup>30</sup> Di sebelah utara, arus laut masuk daerah di sebelah utara pulau, hanya sedikit bisa beredar (karena jalan penghubung menghambatkan peredaran air), maka arus itu keluar lagi melewati Pantai Mertasari, akibatnya terjadi abrasi di pantai itu. Pasir dari Pantai Mertasari mengisi lubang dari pengerukan dan hilang. Menurut Dr. Merta dari Unud, abrasi yang terjadi di sejumlah pantai saat ini meningkat sampai 10 kali dibandingkan beberapa tahun silam.<sup>31</sup>

Selain abrasi, akibat pemotongan arus laut ada penumpukan lumpur dan sampah di daerah hutan bakau di sebelah barat Pulau Serangan. Dulu, pada waktu air pasang, air laut di belakang Pulau Serangan bisa keluar lagi karena ada sirkulasi air laut. Sekarang, walaupun ada alur untuk air laut di bawah jembatan, alur itu hanya sempit dan kebanyakan air tidak bisa keluar, maka sampah dan lumpur yang dibawanya ditempatkan di hutan bakau dan di pelabuan.

### 2.4 Kehilangan Ekosistem Penting

Habitat yang mendukung kehidupan manusia dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. *Feasibility Study* menduga bahwa pengerukan dan penimbunan di beberapa tempat di Pulau Serangan, seperti padang rumput laut, terumbu karang, hutan bakau, dan dataran pasang surut, mungkin melanggar undang-undang ini, yang tujuannya melindungi sistem yang mendukung kehidupan dan kesejahteraan manusia

<sup>29</sup> PT. BTID, Juni 2000, “Executive Summary”, hal. 7.

<sup>30</sup> “Bongkar Reklamasi atau Ganti Bupati dan DPRD”, *Nusa Tenggara*, 20/3/00.

<sup>31</sup> “Proyek BTID Perlu Dikaji Ulang”, *Bali Post*, 26/9/00.

selain keanekaragaman biologis.<sup>32</sup> Namun, kegiatan tersebut terjadi, dengan dampak parah pada lingkungan Pulau Serangan.

Pengerukan yang dilakukan BTID menimbulkan kerusakan pada flora dan fauna laut. Akibat reklamasi, terumbu karang di perairan Pulau Serangan terancam mati. Ekosistem terumbu karang sangat penting, sebagai lahan hidup ikan dan fauna laut lain, dan pemecah ombak yang melindungi pantai dari abrasi. Walaupun pengerukan BTID direncanakan dilakukan pada tempat tertentu sesuai studi pakar Amdal, yang terjadi adalah pengerukan yang sedekat pulau mungkin, yang lebih mudah dilakukan. Akibatnya, terjadi sedimentasi dan meningkatnya kekeruhan air, yang menimbulkan tekanan pada seluruh sistem karang. Lumpur atau 'silt' dari usaha pengerukan menutupi karang, yang akibatnya mati. Sekarang penutupan karang hidup di perairan Serangan berkisar antara 38.08% (sedang) hingga 63% (baik) di kedalaman 3m, sementara di kedalaman 10 m, penutupan karang hidup berkisar antara 0.7% (buruk) hingga 65.8% (baik). Penutupan karang mati di kedalaman 3 m berkisar antara 15.94% hingga 45.16%, dan pada kedalaman 10 m berkisar antara 0.3% hingga 42.9%. Perairan di Pulau Serangan dinilai masih mampu memberikan kapasitas cukup bagi pertumbuhan terumbu karang dengan baik. Namun, di beberapa lokasi tingkat kekeruhan perairan yang tinggi akibat sedimentasi sangat mempengaruhi pertumbuhan terumbu karang.<sup>33</sup>

Terumbu karang di Pulau Serangan juga dirusak karena penambangan karang. Hal ini juga merupakan dampak BTID secara tidak langsung, karena penambang karang itu melaporkan bahwa mereka 'terpaksa' mengambil batu karang karena mata pencahariannya dulu, yaitu ikan hias dan ikan konsumsi, sudah hilang akibat reklamasi. Penelitian di Bali sudah menunjukkan bahwa penambangan karang menyebabkan kerusakan terumbu karang yang sangat serius, dengan menurunkan persentase penutupan karang hidup, dan juga meningkatkan jumlah karang mati atau rusak.<sup>34</sup> Penambang karang di Serangan melaporkan bahwa mereka hanya mengambil karang mati, namun, karang mati nanti bisa dihuni organisme karang dan menjadi karang hidup sekali lagi, maka pengambilannya merusak.

---

<sup>32</sup> LeProvost Dames and Moore, 1994, *op cit.*, hal. 14.

<sup>33</sup> Windy, biologis marin di Yayasan Bahtera Nusantara, email pribadi, 20/2/03.

<sup>34</sup> Putra, K.S., 1992. The Impact of Coral Mining on Coral Reef Condition in the East and South Coast of Bali Indonesia. Centre for Tropical Coastal Management, Department of Marine Science and Coastal Management, University of Newcastle Upon Tyne.



Selain terumbu karang, hutan bakau merupakan ekosistem yang penting sekali, sebagai tempat fauna laut untuk mencari makanan dan berlindung, sebagai pelindung dari bahaya abrasi, dan sebagai saringan untuk lumpur dari sungai. Di Pulau Serangan, kehilangan habitat hutan bakau dinilai tidak bermasalah, asalkan penanaman kembali terjadi.<sup>35</sup> Namun, melihat sejarah hutan bakau di daerah Serangan, penanaman kembali sering tidak terjadi. Misalnya, dulu di daerah Serangan (dari Sanur sampai Nusa Dua) ada mangrove seluas 1373,5 ha. Sekarang ada 708,33 ha, dengan kerusakan yang sudah mencapai lebih dari 600 ha.<sup>36</sup> Yang diambil BTID 80,14 ha, dengan perjanjian akan menanam kembali bakau itu, akan tetapi memang belum terjadi. BTID juga menjanjikan akan melakukan rebiosasi, atau kompensasi hilangnya hutan bakau setengah di Karangasem dan setengah di Jembrana, tetapi ini juga belum terjadi. Rebiosasi tidak ada untungan karena kehilangan fungsi hutan bakau, yang ada di daerah asalnya. Penurunan ikan karang yang dilaporkan penduduk Serangan justru sebagian disebabkan oleh kehilangan ekosistem ini di Pulau Serangan.

## 2.5 Kehilangan Penyu

Walaupun Pulau Serangan dikenal sebagai 'Pulau Penyu', sekarang, menurut penduduk, jarang penyu mendatang. "Kadang-kadang ada, tapi tidak seperti yang dulu, dan mereka tidak bisa bertelur karena pantainya sudah direklamasi," ujar Bapak Sugita, Assisten Ketua Kelompok Nelayan Mina Cipta Karya.<sup>37</sup> Dulu, pada tahun 70-an, banyak penyu bertelur di pasir kuning di sebelah timur dan selatan Pulau Serangan. Menurut penduduk, setiap malam ada 10-15 ekor yang bertelur.<sup>38</sup> Namun, walaupun habitat penyu di Pulau Serangan sama sekali hilang akibat reklamasi pantai, bahkan sebelum proyek BTID mulai jumlah penyu di perairan Bali sudah menurun karena penangkapan (untuk konsumsi atau penjualan) dan gangguan habitatnya. Di Pulau Serangan, kondisi yang disukai penyu untuk bertelur sudah berubah. Misalnya, pada tahun 70-an hanya ada 200-an KK di Serangan dan belum ada listrik, maka penyu mendatang karena pulau itu masih alami dan tidak diganggu orang. Walaupun begitu, juga ada beberapa kondisi alam yang mendukung penyu-penyu bertelur yang hilang akibat reklamasi proyek BTID, antara lain, arus laut dan pantai yang landai.

---

<sup>35</sup> LeProvost Dames and Moore, 1994, *op cit.*, hal. 6-7.

<sup>36</sup> "Hutan Bakau Suwung Diserobot 26 Lembaga", Bali Post, 8/7/00.

<sup>37</sup> Made Sugita, 24/9/02.

<sup>38</sup> Wayan Raga, 25/9/02.

“Kan lucu. Nama proyeknya ‘Pembangunan Pulau Penyu Bali’. Tetapi, setelah selesai kok tidak ada penyu,” kata Wyasa Putra, pengamat lingkungan.<sup>39</sup>

Sejak tahun 70-an, ada Taman Penyu di Serangan, sebagai objek wisata penyu supaya pariwisata dapat mudah melihat binatang laut ini. Dulu, taman penyu itu terletak di ponjok yang sekarang tanah yang dimiliki BTID, dan pariwisata datang dari Bali Beach Hotel di Sanur. Sekarang, Bendesa Adat Serangan, Bapak Wayan Raga, mengelola PT. Cipta Taman Penyu. Ada 125 ekor penyu hijau di kolam, yang paling tua kira-kira 40 tahun. Juga ada fasilitas penetasan – telur dibawa dari Sukabumi di Jawa Barat, ditetaskan dan tukiknya dilepaskan ke laut setiap tahun.<sup>40</sup> Walaupun begitu, pihak WWF Bali mengatakan bahwa taman penyu di Serangan itu merupakan “*quasi conservation*”. Penyu yang ada tidak dibesarkan di sana melainkan ditangkap dari Sulawesi, Maluku dan tempat-tempat lain. Selain itu, keadaan di kolam kurang cocok untuk penyu itu – ruangnya tidak cukup dan mutu air kurang baik. “Sebetulnya itu pembantaian terselubung, karena penyu dijual untuk dimakan”.<sup>41</sup> Namun, ada potensi untuk menciptakan taman penyu yang berkualitas dengan bantuan pakar biologis, hanya modal diperlu. Kesepakatan antara masyarakat dan BTID termasuk pembangunan ‘Turtle Exhibition’ yang dikelola masyarakat, akan tetapi BTID belum memenuhi janji ini.

---

<sup>39</sup> “Kisah Duka Dari Pulau Serangan: Pan Lobeng Kelaparan Kalau Tidak Ngebon”, Bali Post, 26/9/97.

<sup>40</sup> Wayan Raga, 25/9/02.

<sup>41</sup> Icha, WWF Indonesia Wallacea Program, email pribadi - 2/11/02.

## Bab III: Dampak Sosial Budaya

---

### 3.1 Pendahuluan

Proyek BTID sudah menimbulkan permasalahan untuk aspek sosial budaya masyarakat Serangan. Walaupun dampak ini susah dinilai secara materi (misalnya, walaupun harga lahan bisa dinilai, nilai sosial lahan desa yang merupakan integral untuk kehidupan orang desa tidak bisa diperhitungkan), masalah tersebut yang muncul merupakan dampak yang sangat penting diperhatikan karena mempengaruhi inti masyarakat Serangan.

### 3.2 Pelanggaran Hak Asasi Manusia - Pembebasan Tanah

Pembebasan tanah di Pulau Serangan yang dilakukan Panitia Pembebasan Tanah dan diikuti Kodam IX Udayana sebagai pelaksana tugas itu,<sup>42</sup> dinilai melanggar HAM. Dari awal, proses ini dan proses perijinan cacad hukum. Misalnya, ijin prinsip diberikan kepada BTID tahun 1992 untuk “Pelestarian dan Pengembangan Pariwisata di Kawasan Pulau Serangan”, walaupun pembebasan tanah masih belum selesai hingga tahun 1993, dan tanah yang dibebaskan masih dimiliki oleh Kodam sebagai pemberi ganti rugi.<sup>43</sup>

Selain itu, tanah dibebaskan dengan ‘intimidasi’ dari Kodam. Katanya Kodam, tanah masyarakat Serangan harus dibebaskan untuk ‘kepentingan negara’.<sup>44</sup> Akan tetapi, tanah itu dimaksudkan untuk BTID, walaupun pernyataan ini hanya muncul waktu reklamasi mulai pada tahun 1996. Pemilik tanah di Serangan didatangi oleh pihak Kodam, dan berkali-kali dipanggil ke Kodam di Denpasar atau ke Posko (rumah biasa yang dijadikan markas tentara) yang didirikan di Serangan. Hanya ada satu jalan untuk pemilik tanah – harus dijual.<sup>45</sup> Kalau ada yang menahan menyerah tanahnya, dan pemilik tanah di Pulau Serangan sesungguhnya tidak ada maksud untuk menjual tanah warisannya, mereka mengalami intimidasi atau ‘teror mental’ dari Kodam. Ada yang dipenjarai selama sehari; ada yang mengungsi keluar Kabupaten bersama keluarga

---

<sup>42</sup> Kodam menolak tuduhan itu, mengatakan pihak Kodam yang dituduh terlibat “adalah oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab pada Kodam IX/Udayana dan bekerja tidak sesuai perintah Komando”. Lihat “Kodam IX/Udayana tak Pernah Ikut Campur”, *DenPost*, 5/1/01, dan “Pengacara F-Pepermas akan Menghadap Panglima”, *Sinar Bali*, 27-29 Juli 2001. Namun, sebagai buktian keterlibatan Kodam, penduduk Serangan Wayan Patut mempunyai “Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik” itu untuk semua Tahap Pembebasan Tanah yang menggunakan stempel resmi Kodam IX Udayana.

<sup>43</sup> Patut, W., Manik, T.A., dan Triyanto, B., 28 Juni 2001. “Kronologis Kasus Pulau Serangan”. Denpasar, Bali.

<sup>44</sup> “Nasib Warga Serangan Makin Tak Jelas”, *Suluh Rakyat*, Edisi 4 Th.I / 20-27 Juli 2000.

<sup>45</sup> Wayan Losmen, 23/9/02.

karena takut didatangi militer; ada yang ditodongkan pistol ke jidatnya; ada yang dipanggil ke Posko tentara di Serangan dan sempat ditempeleng, walaupun menghindar dan tempelengan itu mengenai meja dan putus, begitu kerasnya; dan satu orang sudah meninggal terkena depresi mental. Kodam membenarkan intimidasinya dengan menuduh masyarakat anggota Partai Komunis Indonesia, atau 'penghambat pembangunan', yang selama Orde Baru dipahami mirip pengkhianatan.

Pembebasan tanah di Pulau Serangan tidak dilakukan sesuai proses jual beli, yang ada permohonan kepada pemilik tanah. Namun, tanah yang dibeli dilakukan secara paksa dan penuh intimidasi. Pemilik lahan dipaksa menyetujui harga Kodam, yaitu Rp2.500.000 per are (100m<sup>2</sup>), walaupun harga pasar pada waktu itu antara Rp15-20 juta/are. Beberapa warga dipaksa untuk menyerah sejumlah uang tertentu sebesar Rp800.000 dari hasil ganti ruginya kepada oknum-oknum aparat Kodam.<sup>46</sup> Ada yang tidak dibayar semua ganti ruginya, dan juga ada yang tanahnya salah diukur dan mereka dibayar setengah ganti rugi saja. Selain itu, uang ganti rugi dipaksa ditabung ke bank-bank yang sudah ditentukan, yang nanti kebangkrutan dan terkena likuidasi. Akhirnya, surat pernyataan penyerahan hak milik yang terpaksa ditandatangani warga, digunakan sebagai bukti pembayaran pihak oleh Kodam dan panitia pembebasan tanah, namun hingga ini pembayaran ganti rugi belum lunas semuanya.<sup>47</sup>

Dalam proses ganti rugi juga ada masalah dengan sertifikat hak milik tanah. Ada beberapa pemilik tanah yang sebagian tanahnya ditukar dengan lahan, akan tetapi tanpa sertifikat milik tanah sampai tahun 2001. Akhirnya, pada bulan April 2001, ada Berita Acara serah sertifikat hak milik atas tanah kepada enam pemilik tanah itu, yang mewakili sebelas warga Serangan. Akan tetapi, sesudahnya mereka mengancam akan melaporkan BTID kepada polisi karena merasa tertipu. Sebabnya, ada klausul yang menyebutkan warga harus menghentikan keterlibatannya dalam kegiatan *reclaiming* lahan di Serangan dan mengatakan dukungannya ke BTID.<sup>48</sup> Warga yang buta huruf disuruh menandatangani kesepakatan itu.<sup>49</sup> Juga, warga kecewa dengan BTID karena sertifikat tersebut tidak boleh diambil dari Badan Pertanahan Nasional tanpa kuasa BTID.<sup>50</sup>

---

<sup>46</sup> "Nasib Warga Serangan Makin Tak Jelas", Suluh Rakyat, Edisi 4 Th.I / 20-27 Juli 2000.

<sup>47</sup> "Pengacara F-Pepermas akan Menghadap Panglima", Sinar Bali, 27-29 Juli 2001.

<sup>48</sup> "Enam Warga Serangan Ancam Laporkan BTID ke Polisi", DenPost, 7/4/01.

<sup>49</sup> "Warga Serangan Ancam Laporkan PT BTID ke Polisi", Nusa Tenggara, 7/4/01.

<sup>50</sup> "Merasa Ditipu, BTID Dilaporkan ke Polda", Radar Bali, 7/4/01.

Sertifikat hak milik juga bermasalah dalam kasus 23 KK yang dulu tinggal pada tanah yang disewakan dari penduduk lain di Banjar Kubu (sebuah kampung dekat perkebunan di bagian selatan pulau), yang digusur, rumahnya dibongkar, dan mereka dipindahkan ke “pemukiman penduduk” di Banjar Dukuh. Mereka diberikan rumah dan tanah oleh BTID, tetapi sampai sekarang tidak ada sertifikat hak milik tanah. Ada hak guna pakai tanah itu, tapi BTID masih ada hak milik tanahnya, dengan demikian bisa memindahkan penduduk ini sekali lagi. Kepala Lingkungan Banjar Dukuh, Bapak Made Karsa, sudah mengajukan surat permohonan hak milik kepada direktur BTID di Jakarta, tapi belum ada jawaban. Mereka dijanjikan setelah proyek dilanjutkan, akan dikasih surat.<sup>51</sup>

### 3.3 Gangguan Terhadap Kesucian Pura

Di Pulau Serangan terdapat pura di semua jarak, yang dianggap membuat pulau itu aman.<sup>52</sup> Ada tiga pura desa yang penting untuk perhubungan dan identitas sosial, keagamaan, kebudayaan dan ekonomis.<sup>53</sup> Selain itu, ada Pura Pat Payung, yang disebut pura *wong gamang* yang dianggap melindungi Pulau Serangan; Pura Tirta Arum, yang dikunjungi orang dari seluruh Bali yang datang untuk mengambil airnya yang dipercayai menyembuh penyakit kulit;<sup>54</sup> Pura Encakan Tingkih, yang ada hubungan khusus dengan penangkapan ikan; Pura Tanjung Sari; dan pura-pura lain.

Selain pura-pura ini, ada Pura Sakenan, yang pentingnya kedua di seluruh Bali sebagai sebuah Pura *Sad Kayangan* (‘enam pura’). Menurut pemangku, pura ini dibangun kira-kira abad ke-16, dan sampai sekarang tidak diganti sama sekali.<sup>55</sup> Puncak upacara di Pura Sakenan adalah Kuningan, yang dirayakan sekali enam bulan. Selama upacara itu, antara 25.000 dan 50.000 orang dari seluruh Bali datang ke Pura Sakenan, dan kira-kira 6000 menginap di *laba pura* atau lahan pura.<sup>56</sup>

‘Pencemaran spiritual’ sudah menjadi topik perhatian masyarakat Bali pada tahun 1993-4, ketika pembangunan Nirwana Bali Resor (NBR) dimulai. Masyarakat Bali banyak memprotes pembangunan ini karena dianggap mengganggu kesucian Pura Tanah Lot, yang pentingnya sama Pura Sakenan, dilihat dalam artikel di pers regional dan dengan adanya banyak demo yang mencapai 5.000 orang. Akibat protes ini, DPRD Bali sementara menghentikan proyek itu. Pada tanggal 25 Januari 1994,

---

<sup>51</sup> Made Karsa, 24/9/02.

<sup>52</sup> Wayan Patut, 15/9/02.

<sup>53</sup> Vickers *et al.*, 1992, *op cit.*, hal. 17.

<sup>54</sup> Wayan Patut, 15/9/02.

<sup>55</sup> Wayan Kondra, Pemangku Pura Sakenan, 25/9/02.

Parisada Hindu Darma (lembaga nasional Hindu) mengeluarkan suatu 'Bhisama' (pengumuman agama) yang melarang pembangunan yang akan mencemarkan 'zona kesakralan', yaitu lahan dalam radius 2km sekitar Pura Tanah Lot. Akan tetapi, Bhisama ini tidak ditafsirkan secara harfiah dan akhirnya Gubernur Bali menyetujui kelanjutan pembangunan proyek NBR dengan menanam 'green belt' antara resort dan Pura Tanah Lot.<sup>57</sup>

Mengenai Pura Sakenan, masyarakat Bali tidak memprotes pada awal proyek karena mereka tidak tahu tentang proyek BTID, selain bahwa tanah penduduk Serangan dibebaskan untuk 'kepentingan negara'. Namun, ketika BTID muncul waktu penimbunan mulai, ada kekhawatiran di masyarakat atas gangguan kesucian Pura Sakenan. Di Pulau Serangan, survei Andal menemukan bahwa 66,66% responden khawatir atas gangguan terhadap kesucian pura akibat proyek BTID.<sup>58</sup> Namun, melihat bahwa pura ini merupakan integral untuk kehidupan keagamaan Bali (sebagai salah satu Pura *Sad Kayangan*) bisa dikatakan bahwa angka ini agak konservatif. Bahkan, 'lahan sakral' di Pulau Serangan tidak diperhitungkan dalam Amdal BTID, yang termasuk jalan penghubung yang sedekat 200m Pura Sakenan. Ternyata, jumlah 90% pembangunan BTID terletak di dalam ruang sakral itu. Dr. Carol Warren dari Universitas Murdoch, Perth, berpendapat bahwa karena pembangunan NBR diperbolehkan walaupun melanggar Bhisama, maka rencana pembangunan BTID di Pulau Serangan tidak diberhentikan, walaupun menanggapi keterlibatan militer dan keluarga Suharto dalam kasus Serangan, ada kemungkinan bahwa proyek BTID dibolehkan sekalipun NBR tidak boleh.<sup>59</sup>

### 3.3 Kebudayaan dan Lahan

Walaupun survei dampak sosial Dr. Vickers dalam *Feasibility Study* termasuk perhatian bahwa dengan adanya proyek BTID, ada kemungkinan bahwa akan terjadi kehilangan kekuasaan keagamaan pulau karena perubahan isolasi dan ketenangan relatif, pelanggaran kesakralan Pura Sakenan, dan kehilangan nilai warisan pulau akibat perubahan bentuknya,<sup>60</sup> Amdal tidak termasuk perhatian ini, dan akhirnya BTID berlangsung dengan rencana yang sangat berdampak pada aspek sosial-budaya ini.

---

<sup>56</sup> Vickers *et al.*, 1992, *op cit.*, hal. 20.

<sup>57</sup> Warren, C. "Tanah Lot: The Cultural and Environmental Politics of Resort Development in Bali". Dalam Hirsch, P. dan Warren, C. (Eds.), 1998. The Politics of Environment in SE Asia: Resources and Resistance. London: Routledge.

<sup>58</sup> LPUU, 1995, *op cit.*, hal. IV – 155.

<sup>59</sup> Dr. Carol Warren, 12/11/02.

<sup>60</sup> LeProvost Dames and Moore, 1994, *op cit.*, hal. 12.

Di Bali ada hubungan kuat antara lahan atau 'bumi' serta kehidupan agama-sosial dan kewargaan. Secara tradisional, lahan desa, termasuk lahan pemukiman, tidak bisa dijual karena lahan itu merupakan warisan dari nenek moyangnya, yang dipercayai masih tinggal di sana. Kepentingan ini dilihat di Pulau Serangan waktu masyarakat sangat menolak penjualan lahan pura dan perpindahan setra (kuburan Hindu) oleh BTID,<sup>61</sup> dan juga rencana BTID untuk merelokasikan semua pura-pura yang di luar pemukiman ke satu kompleks supaya masyarakat tidak akan pergi ke lahan BTID.<sup>62</sup> Akhirnya BTID membatalkan rencananya yang berdampak pada tempat-tempat suci ini. Selain itu, hukum adat dan institusi desa adat mendapatkan kekuasaannya dari lahan desa adat itu.<sup>63</sup> Dengan demikian, ketika BTID mengambil lahan desa adat secara terpaksa, dan merubah bentuk pulaunya, bisa dikatakan bahwa mereka meruntuhkan kekuasaan metafisikal Pulau Serangan, dan kekuasaan desa adat sebagai sebuah kolektip.

Kepentingan lahan di Pulau Serangan juga berdasarkan kepercayaan bahwa pulau tersebut dilindungi oleh *wong gamang*, mahluk halus yang merupakan 'payung' desa. *Wong gamang* dianggap mempunyai 'desa cermin' desa benar, dan tinggal di pohon-pohon di Serangan.<sup>64</sup> Dikatakan bahwa penduduk Serangan tidak pernah sampai mati di luar pulaunya di laut atau di daratan, karena dilindungi *wong gamang* ini.<sup>65</sup> Juga, ada cerita bahwa orang Sanur pernah melihat banyak orang segaya tentara di Serangan, ketika sebenarnya tidak ada apapun. Akibatnya, mereka takut pergi ke Serangan. Penduduk di Serangan menghubungkan hal ini dengan konflik yang dulu ada antara masyarakat Sanur dan Serangan, sekitar tahun 1987. Pada waktu itu, orang dari Sanur menyerang ke Serangan. Katanya penduduk Serangan, kelihatan tentara ternyata adalah pelindung pulaunya.<sup>66</sup> Dengan proyek BTID, *wong gamang* itu pasti diganggu, terutama menanggapi bahwa banyak pohon sudah ditebang atau dalam keadaan yang sakit, dan bentuk pulaunya digantikan.

Oleh karena kepentingan hubungan antara lahan dan kehidupan agama-sosial itu, orang Bali sangat memperhatikan lahannya, dan menghindari kegiatan yang akan mengganggu 'keseimbangan kosmos'. Misalnya, pada tahun 60-an di bawah pemerintahan Sukarno, dengan adanya 'land reform' di Bali, Barisan Tani Indonesia (BTI) mengambil

<sup>61</sup> "Setra Diincar Investor, Warga Serangan Protes", Nusa Tenggara, 11/10/97.

<sup>62</sup> Wayan Patut, 15/9/02.

<sup>63</sup> Warren, C., 1995. Adat and Dinas: Balinese Communities in the Indonesian State. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

<sup>64</sup> Vickers *et al.*, 1992, *op cit.*, hal. 21.

<sup>65</sup> Pak Made, 23/9/02.

<sup>66</sup> Wayan Patut, 23/9/02.

lahan pura, yang dianggap pelanggaran kesakralan pura oleh orang Bali. Beberapa bencana alam yang terjadi pada waktu itu, misalnya letusan Gunung Agung pada tahun 1963 yang didampingi oleh kegagalan panen dan wabah tikus, ditafsirkan sebagai tanda ketidakseimbangan urutan kosmik akibat kegiatan BTI dan Partai Komunis Indonesia secara umum di Bali.<sup>67</sup> Di Pulau Serangan, BTID dianggap mengganggu 'keseimbangan kosmos' dengan proyeknya, dan penduduk melihat kejadian seperti kebangkrutan BTID akibat krisis moneter, likuidasi bank-bank yang menerima tabungan ganti rugi dari pemilik tanah di Serangan, dan penurunan Presiden Suharto sebagai buktinya.

### 3.4 Perubahan Kebudayaan

Penimbunan pada dataran pasang surut, kerusakan lingkungan lain, dan pembebasan tanah perkebunan, menyebabkan terganggunya kehidupan masyarakat, yang mana kebanyakan penduduk Serangan kehilangan apa yang disebut 'budaya primal', yakni budaya nelayan dan petani. Artinya, mereka akan berada dalam kebingungan, akibat perubahan perilaku dari budaya petani atau nelayan ke budaya lain. Hal ini bermasalah untuk orang ini, yang selain nelayan atau petani tidak ada ketrampilan lain, karena budaya baru itu tidak jelas. Masyarakat di Serangan pada umumnya tidak berpendidikan, yaitu, walaupun 59,98% penduduk tamat dari Sekolah Dasar, hanya 8,55% tamat Sekolah Menengah Pertama, dan 4,26% tamat Sekolah Menengah Atas.<sup>68</sup> Akibatnya, waktu pekerjaannya sebagai nelayan atau petani hilang, susah untuk mereka mengalih profesi, dan mereka 'tidur-tiduran' saja. Misalnya, Pan Lobeng, seorang pejuang zaman kemerdekaan yang sudah berusia tua, sekarang harus *ngebon* beras (membeli beras memakai kredit), "kalau tidak *ngebon*, (saya) sudah kelaparan", katanya. Dia dulu adalah nelayan pesisir, dan sekarang terpaksa harus 'tidur-tiduran' karena dataran pasang surut yang dulu tempat penangkapan hasil laut berubah menjadi daratan hasil reklamasi.<sup>69</sup> Memang, melihat sekitar Desa Serangan terdapat banyak penduduk yang duduk dan bercakap-cakap saja, yang dulu jarang istirahat karena selalu pergi ke laut, tetapi sekarang ada banyak waktu. Dengan demikian, masyarakat Serangan berubah dari budaya nelayan yang makmur, kepada budaya yang bersifat banyak pengangguran, waktu bebas, dan ketidakpastian.

<sup>67</sup> Robinson, G., 1995. The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali. Ithaca, USA: Cornell University Press, hal. 270-1.

<sup>68</sup> LPUU, 1995, *op cit.*, hal. IV – 10.

<sup>69</sup> "Kisah Duka Dari Pulau Serangan: Pan Lobeng Kelaparan Kalau Tidak Ngebon", Bali Post, 26/9/97.



Sifatnya perubahan kebudayaan adalah kehilangan pengetahuan lokal. Misalnya, pengetahuan nelayan Serangan tentang penangkapan ikan adalah khusus Serangan. Ada ratusan jenis penangkapan ikan di Serangan, tergantung ikan. Setiap nelayan pesisir ada peralatan yang lengkap, yang berbeda untuk setiap jenis ikan. Mereka membikin sendiri alat-alat itu sudah bertahun-tahun. Mereka tahu musim ikan, yaitu waktu ikan tertentu 'naik', dan tahu alat apa yang perlu dipakai. Menurut warga, ketika mereka naik jukungnya ke laut, mereka tahu tempat ikan dari pohon-pohon di daratan, yaitu, kalau pohon tertentu ada di sana, tahu ikan itu di sini.<sup>70</sup> Dengan kerusakan lingkungan laut dan dataran pasang surut, terjadinya penurunan jumlah ikan, maka anaknya tidak belajar pengetahuan ini dari orang tuanya karena artinya hilang dengan hilangnya ikan. Dicatat bahwa pemuda tidak tahu metode-metode dari dulu tidak karena tidak mau, tapi karena tidak ada alasan karena ikan habis.<sup>71</sup>

### **3.6 Konflik Masyarakat**

Sebelum adanya proyek BTID masyarakat hidup dengan aman dan tentram relatif dalam melaksanakan kehidupan sehari-harinya, tapi dengan adanya proyek BTID, telah menimbulkan permasalahan yang baru bagi masyarakat, yaitu konflik dalam masyarakat Serangan. Dulu, konflik dalam masyarakat Serangan adalah menurut pembelahan partai politik daripada pembelahan etnik antara orang Bugis dan Bali. Bahkan, warga Bugis berhidup rukun dengan warga Hindu Pulau Serangan dan dianggap "bersaudara".<sup>72</sup>

Dengan adanya proyek BTID, konflik dalam masyarakat muncul antara pemilik tanah dan yang tidak memiliki tanah; antara yang menyetujui proyek, dan yang menolak; dan selama beberapa tahun terakhir ini, yang mau tanahnya dikembalikan dan yang mau ganti rugi. Setelah penurunan Presiden Suharto tahun 1998, dengan mulainya era reformasi, pemilik tanah berani untuk menolak BTID. Mereka yang paling dipengaruhi oleh proyek BTID pada waktu itu, karena tanahnya dibebaskan dengan ganti rugi yang tidak sesuai. Dengan menolak proyek, masyarakat lain menanggapi mereka menghambat proyek, yang dipikirkan akan memberikan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik.

Selain itu, ada tuduhan korupsi di masyarakat Serangan. Katanya, pada waktu konstruksi proyek banyak orang diberikan uang supaya mereka tidak memprotes lagi. Caranya begini: "Kamu mau dikasih duwit Rp25.000.000 dan diajak kerja untuk BTID

---

<sup>70</sup> Pak Made, 23/9/02, dan Pak Rontang, 24/9/02.

<sup>71</sup> Pak Made, 23/9/02.

<sup>72</sup> Wayan Patut, 14/9/02.

dikasih gaji Rp1.500.000?”. Yang mau uang itu diajak ke kantor lurah untuk menandatangani kesepakatan. Katanya juga, beberapa anggota Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), yang merupakan institusi pemerintah yang dibentuk dari Kepala Lingkungan setiap banjar dan tokoh-tokoh masyarakat lain, dibayar untuk memberikan informasi dari pertemuan LKMD kepada BTID. Konflik masyarakat ini bisa dilihat pada tahun 1998, waktu masyarakat Serangan menuntut Lurah Serangan Ngurah Made Wijaya mundur dari jabatannya karena dinilai gagal memimpin Kelurahan Serangan dan tidak menanggapi terhadap keluhan masyarakat Serangan atas soal proyek BTID.<sup>73</sup> Juga, dia disebut ikut-ikutan mengintimidasi warga.<sup>74</sup> Pada era reformasi, ketika cap ‘KKN’ (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) merupakan sesuatu yang buruk sekali, kecurigaan dan tuduhan dalam masyarakat menyumbang kepada kerusakan materi sosial masyarakat Serangan.

Setelah keberhentian proyek BTID, konflik dalam masyarakat Serangan masih muncul. Pada bulan Desember 2000, 35 warga Serangan melakukan ‘*reclaiming*’ tanahnya, yaitu menuntut bahwa tanahnya dikembalikan, yang dulu dibebaskan BTID dengan cara yang melanggar HAM. Mereka mendirikan papan pada lahan yang dimiliki BTID dengan kata-kata, “TANAH MILIK WARGA ADAT SERANGAN”. Kegiatannya dipersoalkan oleh warga Serangan lainnya, yang menilai kegiatan ‘*reclaiming*’ itu mengatasnamakan desa adat. Lurah Serangan menjelaskan, “tak semua warga menginginkan hal itu”.<sup>75</sup> Ada pertemuan antara semua pihak, dan akhirnya diminta agar pernyataan itu harus ditambah dengan 35 nama warga yang terlibat dalam aksi itu.<sup>76</sup> Kejadian ini menunjukkan bahwa masih ada konflik dalam masyarakat Serangan. Memang, ada warga yang masih dianggap menghambat proyek, termasuk yang ikut ‘*reclaiming*’ tanah, sampai mereka tidak mau pergi ke banjar tertentu karena penduduk di sana dianggap “sangat pro BTID”. Konflik masyarakat ini muncul akibat adanya proyek BTID, dan diperparahkan oleh kehilangan mata pencaharian dan pengangguran masyarakat yang menyebabkan ketidakpastian kehidupannya.

### 3.5 Isolasi Masyarakat

Rencana BTID membangun kanal wisata sudah dipertanyakan karena akan membuat masyarakat Serangan terisolasi di pulau sendiri. Dari awalnya, *Feasibility Study* mempertanyakan kanal wisata, yang disebut “jelas merupakan hambatan kepada jalan masuk”, dan menyusulkan “bahwa BTID mencari nasehat dari pakar dan masyarakat

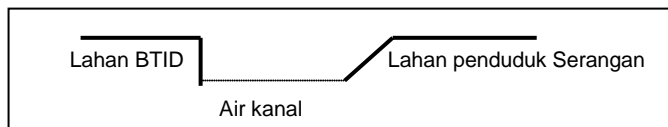
<sup>73</sup> “Lurah Serangan Dituntut Mundur”, *Bali Post*, 27/8/98.

<sup>74</sup> “Warga Serangan Tuntut Pemprov Kembalikan Tanahnya”, *Nusa Tenggara*, 30/1/01.

<sup>75</sup> “Lagi, FPAMS Perjuangkan Reclaiming Serangan”, *Nusa Tenggara*, 19/1/01.

<sup>76</sup> “Reclaiming Lahan BTID Dipersoalkan”, *DenPost*, 12/1/01.

tentang cara menggabungkan penduduk Serangan dalam proyek”.<sup>77</sup> Namun, kanal itu masih dimasukkan dalam Amdal, dan dibangun. Maksud BTID membangun kanal itu telah dipertanyakan karena lebarnya kanal ‘wisata’ itu sebenarnya hanya kurang lebih 10m, maka tidak bisa digunakan untuk kegiatan bahari pariwisata biasa (*jet ski, speedboat*). Menurut BTID, kanal itu bisa dipakai oleh masyarakat Serangan untuk main atau mandi di perairan. Walaupun begitu, bentuk kanal itu begini:



Dengan demikian, kanal itu merupakan batasan supaya sulit untuk masyarakat Serangan masuk ke lahan BTID. Selain itu, pada awalnya kanal itu hanya ada satu jembatan terletak dekat tempat masuk jalan penyebaran, dengan demikian perjalanan masyarakat ke lahan BTID dihambati. Nanti tiga jembatan dibangun tetapi hanya karena tuntutan masyarakat. Akhirnya, kanal itu membendakan masyarakat, yakni membuat mereka “seperti ikan dalam akuarium”.<sup>78</sup>

<sup>77</sup> LeProvost Dames and Moore, 1994, *op cit.*, hal. 10.

<sup>78</sup> Wayan Patut, 14/9/02.

## Bab IV: Dampak Ekonomi

---

### 4.1 Pendahuluan

Dampak proyek BTID pada bidang ekonomi masyarakat Serangan pada umumnya kurang baik. *Feasibility Study* merekomendasikan bahwa kehilangan sumber-sumber pencaharian masyarakat harus ditenangkan oleh (antara lain) penyediaan kesempatan pekerjaan dan pelatihan pekerjaan, yang merupakan syarat penting untuk menggantikannya penduduk Serangan.<sup>79</sup> Pada tahapan sosialisasi BTID menjanjikan hal ini, dan jalan penyeberangan disebut akan membuka kesempatan pekerjaan di Bali untuk penduduk Serangan. Masyarakat pada waktu itu melihat proyek BTID sebagai cara untuk meningkatkan taraf hidupnya dari nelayan ke bidang pariwisata, seperti yang terjadi di Nusa Dua.<sup>80</sup> Memang, pekerjaan di proyek BTID merupakan harapan utama untuk penduduk masyarakat Serangan, dengan 74,49% responden survei Amdal mengharapkan kesempatan kerja pada tahap konstruksi.<sup>81</sup>

Akan tetapi, walaupun BTID menjanjikan akan mempekerjakan 600 penduduk lokal selama masa konstruksi,<sup>82</sup> yang terjadi adalah masyarakat Serangan yang bekerja di proyek BTID hanya 150 orang, (sisanya yang berjumlah 350 orang berasal dari luar) sedangkan sebagian besar masyarakat tidak mendapat pekerjaan. Juga, masyarakat yang dipekerjakan BTID, pada tanggal 4 Juni 1998 di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dengan uang pesangon yang tidak memadai (masing-masing Rp250.000).<sup>83</sup> Selain itu, kerusakan lingkungan laut dan pengalihan tanah perkebunan akibat proyek BTID menyebabkan kehilangan mata pencaharian pokok untuk penduduk Serangan. Kehilangan mata pencaharian ini sangat parah melihat bahwa *sebelum* proyek BTID penduduk Serangan mempunyai pendapatan per kapita (Rp942.993/tahun) yang dianggap lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan per kapita Bali (Rp1.627.937/tahun).<sup>84</sup>

Walaupun harapan mendapat pekerjaan di proyek BTID masih kuat antara masyarakat Serangan, dengan kebanyakan responden menyetujui kelanjutan proyek itu dengan

---

<sup>79</sup> LeProvost Dames and Moore, 1994, *op cit.*, hal. 8-9.

<sup>80</sup> Made Karsa, 24/9/02.

<sup>81</sup> LPUU, 1995, *op cit.*, hal. IV – 151-2.

<sup>82</sup> *Ibid.*, hal. III – 23.

<sup>83</sup> Patut, W., 5 Januari 2001. "Usulan Program Pemulihan Lingkungan Melalui Pengembangan Tanaman Produktif dan Tanaman Penghijauan", Forum Pemulihan Pertiwi Masyarakat Serangan (F-Pepermas), Pulau Serangan, Bali.

<sup>84</sup> Angka pendapatan per kapita Pulau Serangan: LPUU, 1995, *op cit.*, hal. IV – 127. Angka Bali (1993): Biro Pusat Statistik, 1995. *Statistik Dalam 50 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: BPS, hal 258.

alasan supaya mereka atau anaknya bisa bekerja di sana, ada yang merasa marah dengan BTID. “[BTID] bilang dengan jalan itu kita di Serangan ini akan mudah pergi ke kota. Tapi menurut saya, bagaimana masyarakat akan bisa ke kota, dengan apa ia akan ke sana, kalau mata pencaharian utama mereka justru dimatikan oleh jalan itu”.<sup>85</sup>

#### 4.2 Kerugian masyarakat

Dalam Andal, diakui bahwa lahan pertanian dan sumber kelautan adalah sangat penting, dan bahwa “sumber daya kelautan sulit untuk dapat diukur.”<sup>86</sup> Tim Andal memperkirakan bahwa jumlah nilai produksi di Pulau Serangan adalah Rp2.584.745.260/tahun.<sup>87</sup> Akan tetapi, setelah proyek BTID mulai, nilai produksi ini turun tajam karena kehilangan hasil petani dari hasil tanaman kelapa, tanaman bahan makanan dan perternakan karena lahan perkebunannya menjadi lahan BTID, dan kehilangan nilai produksi ikan laut dan ikan hias akibat dampak lingkungan pengerukan dan penimbunan pada dataran pasang surut.

Seorang penduduk Serangan, Wayan Patut, memperkirakan bahwa:

- a) para nelayan kecil sebanyak 350 orang dengan penghasilan perorangan Rp50.000/hari x 365 hari = Rp 7.387.500.000;
- b) para pedagang cenderamata 120 orang dengan penghasilan perorangannya Rp25.000/hari x 365 hari = Rp1.095.000.000; dan
- c) kelompok penambang 38 orang dengan penghasilan perorangannya Rp25.000/hari x 365 hari = Rp346.750.000.

Maka, jumlah kerugian materi bagian masyarakat Serangan ini mencapai sekitar Rp8.829.250.000 per tahun,<sup>88</sup> belum termasuk bagian petani yang kehilangan lahan perkebunannya. Dengan kerugian sebesar ini, bisa dipikirkan bahwa masyarakat pasti digantirugi oleh pihak BTID. Bahkan, masyarakat Serangan sama sekali tidak digantirugikan untuk kehilangan mata pencaharian.

#### 4.3 Nelayan

Di Pulau Serangan 85% penduduk bekerja sebagai nelayan, termasuk nelayan pesisir dan nelayan laut lepas.<sup>89</sup> Dulu, sebelum reklamasi, pantai timur dan utara Serangan adalah sumber penghidupan dan pendapatan mereka. Dari daerah itu, mereka bisa

<sup>85</sup> Pak Rontang, 24/9/02.

<sup>86</sup> LPUU, 1995, *op cit.*, hal. IV – 119.

<sup>87</sup> *Ibid.*, hal. IV – 123-7.

<sup>88</sup> Wayan Patut, 15/9/02. Juga melihat Surat Pembaca, “Ancaman Lingkungan pada Proyek BTID”, *Bali Post*, 25/3/00.

memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, dan menyekolahkan anaknya. Pada waktu siang, mereka menangkap ikan konsumsi, ikan hias, rumput laut, dan kepiting. Pada waktu malam memakai lampu, bisa mencari udang, kepiting, ikan konsumsi, dan cumi-cumi. Pada saat itu, belum pernah mereka perlu bantuan dari mana-mana. Jarang anaknya minta uang dari orang tuanya – kalau perlu uang, mereka mencari ikan saja.<sup>90</sup>

Sekarang, 70% dataran pasang surut hilang akibat reklamasi. Juga, akibat penimbunan, arus laut sekitar Pulau Serangan berubah, dan pola ikan juga berubah. Untuk nelayan pesisir yang tidak mampu pergi ke laut lepas, hal ini sangat mengawatirkan. Kalau dulu (sebelum proyek BTID) mereka mendapat hasil paling sedikit cukup untuk makan, Rp5-10.000/hari (waktu itu US\$1 = Rp1800),<sup>91</sup> sekarang mendapat Rp5-10.000/hari dari ikan-ikan kecil (5-10cm) yang masih ada di sebelah utara pulau. Juga, udang, kepiting atau cumi-cumi kadang-kadang nelayan mendapat satu.<sup>92</sup> Mereka menanggapi “kehidupan nelayan di Serangan kini mati. Kami tidak bisa bekerja apa-apa”.<sup>93</sup>

Selain nelayan pesisir, ada nelayan yang pergi ke laut lepas, naik jukung ke kawasan selatan Nusa Penida, 4 mil dari Serangan. Untuk nelayan laut lepas ini, proyek tidak ada dampak pada nafkah pokoknya. Akan tetapi, dengan keadaan di laut lepas semakin buruk, dengan penurunan jumlah ikan, maka nelayan ini tidak bisa kembali ke sumber alternatif mata pencahariannya di perairan Serangan, karena sumber daya ini sudah hilang akibat proyek. Dari hasil laut lepas, dulu mereka rata-rata mendapat Rp25.000/hari (US\$1=Rp1800), akan tetapi sekarang kadang-kadang mendapat Rp50.000/hari, tetapi menurutnya tidak tertentu dapatnya.<sup>94</sup> Menurut Bapak Kari, Ketua Kelompok Nelayan Mina Cipta Karya II yang anggotanya 65 orang, dewasa ini juga ada masalah dengan kapal dari luar negeri (Taiwan, Cina) yang menangkap ikan di perairan Indonesian secara skala besaran dan tidak sah. Mereka memakai teknologi canggih, seperti alat deteksi radar bawah air, untuk melihat tempat berkumpulnya ikan. Kegiatannya sudah sangat merugikan nelayan Pulau Serangan. Dia, bersama Assisten Ketua, pernah melaporkan kapal itu ke bea cukai dan angkatan laut. Walaupun setelah itu kapal itu berhenti beberapa bulan, sekarang ada lagi.<sup>95</sup>

---

<sup>89</sup> Wayan Patut, 15/9/02.

<sup>90</sup> Pak Made, 23/9/02.

<sup>91</sup> Ibid.

<sup>92</sup> Pak dan Ibu Mini, 25/9/02.

<sup>93</sup> Pak Made, 23/9/02.

<sup>94</sup> Made Sugita, Asisten Ketua Kelompok Nelayan Mina Cipta Karya II, 24/9/02.

<sup>95</sup> Bapak Kari, 25/9/02.

#### 4.4 Penambang

Dulu, sebelum proyek BTID, ada 38 KK yang bekerja sebagai penambang perahu penyebrangan dari daratan Bali ke Pulau Serangan. Dalam satu hari mereka bisa mendapat uang cukup untuk biaya keluarga (Rp50.000), dan dalam tiga hari saat upacara Kuningan di Pura Sakenan, penambang ini bisa memperoleh Rp3 juta.<sup>96</sup> Setelah BTID membangun jalan penghubung, 38 orang ini sama sekali tidak ada pekerjaan lagi.

#### 4.5 Kafe dan Kiosk

Sebagian masyarakat Serangan sudah mencari nafkah di tempat lain, dengan membangun kafe-kafe (tempat hiburan malam, yang mana ada karaoke dan minuman keras), dan juga warung (disebut 'kiosk') di pantai timur, pada tanah yang dimiliki BTID. Dalam *MoU*, BTID menyetujui penggunaan lahan 'tidur' BTID oleh penduduk Serangan, akan tetapi tidak termasuk hak pinjam yang berarti bahwa nanti, kalau proyek dilanjutkan, penduduk akan digusir dan perusahaannya dibongkar.

Kiosk di pantai timur dimiliki kelompok Ibu-Ibu, namanya "Pedagang Pantai Timur", yang sudah berlanjut 3 tahun. Setiap hari mereka harus berjalan satu setengah jam satu jalur ke pantai timur. Katanya, pada tahun 70-an dulu mereka menjual cenderamata di taman penyu dan bisa mendapat kira-kira Rp50.000/hari. Tetapi, setelah proyek BTID mulai, lokasi taman wisata itu menjadi tanah proyek, dan mereka harus mencari mata pencaharian lain. Sekarang, di pantai timur, mereka menjual minuman, makanan dan oleh-oleh kecil kepada pendatang, kebanyakannya *surfers* yang datang ke tempat selancar terkenal itu. Uang dari oleh-oleh itu setiap hari dibagi antara mereka, yang jumlahnya sekarang 15 orang.

Walaupun ibu-ibu ini sangat kreatif di bidang bisnis, mereka menanggapi bahwa "nasib kita sesungguhnya bak menunggu di depan mulut harimau yang kelaparan."<sup>97</sup> Soalnya, karena gelombang di pantai timur hanya baik kalau angin dari barat, yaitu bulan Nopember sampai Maret, selama kebanyakan setiap tahun pariwisata hanya sedikit. Juga, sejak serangan teroris di Amerika Serikat tahun yang lalu, pariwisata semakin sedikit. Bahkan, tamu yang berkunjung ke pantai timur "bisa dihitung dengan jari saja."<sup>98</sup> Dengan demikian, mereka 'bankrut' – kadang-kadang mendapat Rp5.000/hari, sering tidak ada uang sama sekali.

---

<sup>96</sup> Wayan Losmen, 23/9/02.

<sup>97</sup> Ibu Mary, Ibu Mini dan Ibu Yogi, 15/9/02.

#### 4.6 Penambangan Karang

Akibat kerusakan terumbu karang dan padang rumput laut alami di perairan Pulau Serangan karena pengerukan dan penimbunan proyek BTID, nelayan pesisir kehilangan mata pencaharian. Selain itu, dilaporkan bahwa setelah terjadinya PHK BTID bulan Agustus 1998, sebanyak 80 KK mengambil batu karang dari perairan Serangan secara massa dan terbuka.<sup>99</sup> Walaupun penambangan karang dilanggar, penduduk ini merasa terpaksa melakukannya karena mata pencaharian dulu sudah hilang. “Tidak ada jalan lain sekarang. Kalau ada pekerjaan lain, aku pasti mau ikut.”<sup>100</sup> Mereka juga tahu penambangan karang merusak lingkungan, “tapi daripada saya tidak makan, ya lebih baik mengambilnya.”<sup>101</sup>

Masyarakat melapor bahwa batu karang itu dibeli untuk pura dan bangunan lain. Hampir semua pembeli batu karang berasal dari kalangan perhotelan dan orang-orang berduit saja, karena harganya yang relatif mahal. Biji yang ukurannya 30 x 15 x 7,5 cm dijual untuk Rp7.500 per biji kepada orang langsung. Ada yang menunggu pesanan dari tamu, lalu turun, dan ada yang turun setiap hari biar ada *stock*. Katanya, mereka mengambil karang yang sudah mati (maka lebih keras) di sebelah timur dan utara pulau yang hasil dari pengerukan, tetapi sekarang susah mencari karang karena karang sudah mengurang di sana.

---

<sup>98</sup> Ibu Mini, 26/9/02.

<sup>99</sup> “Marak, Pengambilan Batu Karang Di Pulau Serangan”, Nusa Tenggara, 2/9/98.

<sup>100</sup> Mas Made, 23/9/02.

<sup>101</sup> “Marak, Pengambilan Batu Karang Di Pulau Serangan”, Nusa Tenggara, 2/9/98.



## Bab V - Solusi Untuk Masa Depan

---

### 5.1 Pendahuluan

Kebanyakan Pulau Serangan, selain pemukiman, sekarang 'kosong'. BTID menunggu investor, akan tetapi, investor baru akan mewariskan tanggungjawab untuk permasalahan lingkungan, hukum (seperti ancaman *class action* oleh penduduk yang dulu memiliki tanah), keuangan (ada tuduhan hutangan besar untuk pengerukan dan penimbunan, serta tuntutan ganti rugi), maka kemungkinan menemukan investor baru hanya sedikit. Masyarakat Serangan menunggu BTID, supaya mereka bisa bekerja di sana. Walaupun instansi yang terkait tidak mampu mensyaratkan BTID melanjutkan proyeknya, solusi harus dicari supaya keadaan lingkungan dan masyarakat tidak semakin buruk.

Pansus evaluasi BTID merupakan kesempatan pertama untuk DPRD Bali paska-Orde Baru memperbaiki situasi Pulau Serangan, untuk membuat keputusan yang kuat, tetapi mereka gagal. Dalam pemutuserannya, walaupun ada syarat yang BTID harus memenuhi, termasuk melaksanakan kesepakatannya dengan masyarakat Serangan, tidak ada keputusan atau sangsi benar. Dewan memandang perlu adanya studi dan kajian yang komprehensif dengan data dan informasi yang lengkap, dan tentang masalah pembebasan tanah menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum, dengan demikian membebaskannya dari tanggungjawab lebih lanjut.<sup>102</sup>

### 5.2 Sikap Masyarakat Terhadap Proyek BTID

Dengan kerusakan lingkungan, kehilangan mata pencaharian, dan pelanggaran HAM yang terjadi di Pulau Serangan akibat proyek BTID, secara logika bisa diperkirakan bahwa penduduk Serangan akan menolak kelanjutan proyek. Namun, semua penduduk Serangan yang diwawancarai, termasuk yang dulu menolak BTID mengenai kasus pembebasan tanah, menyetujui kelanjutan proyek. Bahkan, di depan Pansus BTID DPRD Bali, masyarakat Serangan tetap menginginkan agar proyek BTID dilanjutkan, agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.<sup>103</sup> Ketika penulis menanyakan apa yang mereka inginkan untuk pulaunya, mereka menjawab bahwa tidak mungkin dikembalikan seperti asli. Kebanyakannya tidak ada ide selain proyek dilanjutkan. Pariwisata dilihat sebagai penyelesaian untuk mereka, "tidak ada jalan lain".<sup>104</sup> Ada kekhawatiran bahwa kalau dibatalkan, tanah BTID menjadi tanah 'kosong' seperti sekarang. Pikirannya, kalau ada proyek, BTID bisa mempekerjakan

<sup>102</sup> "Akhirnya, DPRD Bali Keluarkan Rekomendasi", Bali Post, 17/5/01.

<sup>103</sup> "Pansus BTID Gelar Dialog, Warga Ingin Proyek Dilanjutkan", Denpost, 15/7/00.

mereka, dan mengurangi pengangguran. Mengenai proyek BTID, masyarakat Serangan agak fatalistik, menjawab, “ada baiknya, ada buruknya. Bukan jelek semuanya. Ada yang bagus”.<sup>105</sup> Dengan sikap baik dalam masyarakat terhadap kelanjutan proyek, solusi lebih mudah dicarikan.

### 5.3 Solusi Lingkungan

Kerusakan lingkungan yang telah dan sedang terjadi harus dikaji dan solusi harus dicarikan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Pada tingkat pemerintah, yang diperlukan adalah Amdal kawasan regional, seperti Rencana Kawasan Bali yang dirumuskan pada tahun 1969, tetapi yang benar-benar diselenggarakan. Evaluasi terhadap Amdal yang telah dikeluarkan harus dilakukan untuk mengecek kalau ada pelanggaran, dan sanksi untuk pelanggaran itu harus ditetapkan. Sebuah Strategi Pengelolaan Zona Pesisir yang Terpadu direkomendasikan untuk pembangunan dan restorasi lingkungan di zona Teluk Benoa – Pulau Serangan.<sup>106</sup> Untuk masalah abrasi, pakar lingkungan Made Mangku mengajukan solusi, yaitu bahwa setengah reklamasi di sebelah selatan pulau dibongkar agar tidak terjadi abrasi lagi dan jembatan ditambah 100m lagi biar sirkulasi air laut lebih ‘sempurna’ seperti dulu.<sup>107</sup> Untuk memperbaiki ekosistem penting, hutan bakau harus ditanam kembali di beberapa lokasi. Sayangnya, ekosistem terumbu karang susah untuk memperbaiki karena laju pertumbuhannya pelan sekali. Pemantauan terumbu karang Serangan baru saja dilakukan oleh Yayasan Bahtera Nusantara untuk Dinas Lingkungan Hidup Denpasar, untuk mengecek kondisinya. Dengan data itu, kebijakan bisa dirumuskan untuk pengelolannya, dengan demikian mencegah kerusakan lebih lanjut. Untuk penyu, sayangnya juga kerusakan habitatnya di Pulau Serangan susah untuk dikembalikan. Akan tetapi, dengan bantuan dari pihak tertentu (seperti WWF Wallacea Bali), taman penyu yang ada di Serangan dapat dikembangkan menjadi usaha pelestarian dan penetasan penyu yang lebih menurut nilai konservasi. Namun, semua solusi ini perlu uang yang cukup besar, yang pada saat ini dengan penurunan ekonomi Indonesia akibat krisis moneter mungkin susah ditemui untuk kebutuhan lingkungan seperti ini. Akan tetapi, kerusakan menjadi semakin parah, dan itu masyarakat Serangan yang berdampak, maka pemerintah daerah dan BTID seharusnya berdua bertanggungjawab atas permasalahan ini.

---

<sup>104</sup> Wayan Raga, 25/9/02.

<sup>105</sup> Pak Made, 23/9/02.

<sup>106</sup> Knight, *et al.*, 1995, *op cit.*, hal. 285.

<sup>107</sup> Made Mangku, 9/8/02.

#### 5.4 Solusi Sosial Budaya

Untuk pelanggaran HAM dalam kasus pembebasan tanah secara terpaksa, solusi jelas – pemilik tanah sedang meminta ganti rugi yang wajar untuk tanahnya. Pemerintah Daerah sudah mengucapkan bahwa instansinya tidak bisa memutuskan tuntutan ganti rugi, yang harus diajukan ke pengadilan. Akan tetapi, penduduk ini tidak mampu melakukan hal itu sendiri, maka perlu bantuan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bali. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali telah mulai mengumpulkan data dari penduduk Serangan yang dikenakan pembebasan tanah untuk kasus hukum melawan BTID dan Kodam. Namun, pembelahan muncul ketika pemilik tanah meminta ganti rugi daripada tanahnya dikembalikan karena keinginan itu menentang format LBH, yang merupakan “tanah untuk rakyat”.<sup>108</sup> Juga, LBH Bali akhirnya menyadari bahwa *class action* pada dasar lingkungan saja bisa diajukan, karena hanya kelompok lingkungan mempunyai arti hukum. Oleh karena itu, masyarakat Serangan menanggapi LBH mementingkan dirinya dalam membantunya, bukan mementingkan kesejahteraan warga Serangan. Mereka tidak tertarik mengajukan kasus lingkungan karena dipikirkan kasus tersebut tidak akan memanfaatkannya. Selain itu, pada waktu Pansus BTID DPRD Bali, masyarakat Serangan semuanya menyetujui kelanjutan proyek, dan hal ini dianggap oleh LSM-LSM seperti LBH sebagai masyarakat meninggalkan gerakannya. Walaupun ada yang menanggapi kasusnya kuat, akhirnya kasus itu tidak sampai pengadilan karena hubungan antara masyarakat Serangan dan LBH diputuskan. Untuk solusi di bidang ini, gerakan masyarakat Serangan harus kuat, dan di tingkat LSM harus ada gerakan terpadu. Di tingkat masyarakat, kelompok pemilik tanah telah dibentuk, dengan nama Forum Pemulihan Pertiwi Masyarakat Serangan (F-Pepermas). Mereka sekarang mau mengajukan *class action* sendiri untuk menuntut ganti rugi yang wajar, namun tidak ada bantuan dari LSM di Bali.

Selain itu, LSM dan pemerintah bisa membantu masyarakat Serangan, terutama yang tinggal di Banjar Dukuh, untuk memaksa BTID mengurus sertifikat untuk tanahnya. Orang ini sedang dalam keadaan ketidakpastian tanpa sertifikat, karena kapan saja tanahnya bisa diambil lagi oleh BTID.

Mengenai gangguan kesucian Pura Sakenan, perubahan budaya, dan gangguan hubungan antara masyarakat dan lahannya, kerusakan telah terjadi, dan di bidang ini susah mencari solusi karena hal ini bersifat sosial daripada materi. Akan tetapi, untuk menghindari kerusakan lebih lanjut, masyarakat Serangan harus dilibatkan penuh

dalam pengambilan keputusan untuk pulaunya. Hal ini sangat penting dalam merumuskan solusi untuk Pulau Serangan. Dari awalnya proyek masyarakat tidak terlibat dalam proses perencanaan, dan ternyata hanya tahu adanya proyek ketika tanahnya mulai dibebaskan. Sekarang, masyarakat masih ada perasaan keadaan tak berdaya untuk memutuskan nasib pulaunya sendiri. Ketika ditanyakan mengenai sikapnya tentang proyek BTID, suatu responden menjawab, “Tidak bisa bilang setuju atau tidak setuju. Tidak bisa bilang apa-apa. Semuanya terserah BTID. Kita akan terima saja. Lanjutkan, tidak lanjutkan. Saya terima.”<sup>109</sup> Perasaan ini harus diganti melalui pemberdayaan masyarakat seperti keterlibatannya dalam proses pemutusan, dengan demikian bisa menjadikan solusi untuk permasalahan lain seperti konflik masyarakat dan terisolasi masyarakat karena akan memperkembangkan permusyawaraan antar-pihak.

### 5.6 Solusi Ekonomi

Di bidang ekonomi, di jangka pendek mata pencaharian alternatif harus diciptakan untuk penduduk Serangan sambil proyek BTID tidak berjalan. Dulu, pada tahun 1998, Pemerintah Daerah Bali merumuskan program padat karya di Bali, termasuk budidaya rumput laut di Pulau Serangan.<sup>110</sup> Program ini akhirnya tidak ada kelanjutan, karena ditolak oleh pihak Serangan yang sudah tahu membudidayakan rumput laut tidak berhasil di Pulau Serangan karena kondisi lingkungan kurang cocok.<sup>111</sup> Program seperti ini sangat diperlukan penduduk Serangan segera untuk mengurangi pengangguran, tetapi supaya berhasil harus ada masukan dari masyarakat.

Solusi jangka panjang harus dirumuskan untuk mengurangi dampak proyek yang buruk pada ekonomi Serangan. Kalau proyek dilanjutkan, penduduk bisa bekerja di sana, asalkan ada pelatihan pekerjaan dari BTID. Kalau proyek dilanjutkan atau tidak dilanjutkan, BTID harus terpaksa menyediakan sarana dan fasilitas pendidikan sesuai yang tertuang dalam kesepakatan, supaya yang kehilangan mata pencaharian akibat proyek BTID bisa memasuki bidang pekerjaan lain. Juga, salah seorang Serangan menuntut bahwa minimal 10% dari hasil reklamasi menjadi hak pengelolaan secara penuh Desa Adat Serangan sebagai ganti rugi direklamisasinya pantai Pulau Serangan

---

<sup>108</sup> Divisi Tanah dan Lingkungan Lembaga Bantuan Hukum Bali, 30 Juni 2000. “Laporan Kegiatan Diskusi Pengungkapan Kasus Pembebasan Tanah oleh Kodam Udayana di Pulau Serangan di LBH Bali Tanggal 27 Juni 2000”. Denpasar, Bali.

<sup>109</sup> Bapak Mini, 26/9/02.

<sup>110</sup> “Arsana Dukung Gerakan Pemuda Serangan”, Bali Post, 16/7/98.

<sup>111</sup> Lihat “SKPPLH Khawatirkan Pengembangan Rumput Laut di Pulau Serangan”, Nusa Tenggara, 16/7/98.

yang merupakan sumber kehidupan para nelayan pesisir.<sup>112</sup> Dengan demikian, ekonomi Serangan bisa diperbaiki.

Penyelesaian lain untuk meningkatkan ekonomi Serangan adalah untuk mengembalikan seluruh tanah kepada masyarakat Serangan supaya dapat digunakan untuk kegiatan produksi lagi. Namun, seperti dikatakan Lurah Serangan, “masyarakat tidak bisa bekerja sendiri – perlu bantuan pihak lain”.<sup>113</sup> Sebaliknya, yang lebih bermanfaat adalah kalau masyarakat diberi saham ataukah Pemerintah Daerah mengambalalih aset BTID tersebut.<sup>114</sup> Made Mangku mengajukan ide untuk membuat taman rekreasi atau kebun binatang, bukan resort karena sudah ada cukup banyak resort di Bali yang tidak bisa memenuhi kamarnya.<sup>115</sup> Wayan Patut menyetujui ide ini, dan sudah menulis dokumen “Konsep Kemitraan Pilar Pelestarian dan Pengembangan Pulau Serangan” yang mengembangkan ide ini, seperti: Taman Wisata; Taman Kebudayaan dan Spiritual; Pusat Pasar Usaha Kecil Menengah; Sarana Umum seperti terminal desa, rumah sakit, sekolah kejuruan, telepon, lapangan olah raga; wisata bahari; akuarium besar; dan beberapa fasilitas lainnya yang mencerminkan wujud budaya Bali.<sup>116</sup> Walaupun ide-ide ini ada potensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Serangan dengan mewujudkan industri pariwisata di pulauanya, ide ini perlu modal dan dukungan dari Pemerintah Daerah yang keduanya belum ada.

## Bab VI – Penutup

---

Proyek BTID merupakan contoh kewarisan dari era Suharto. Proyek ‘raksasa’ ini didukung oleh pihak militer, dan pemimpin grop investornya merupakan anggota keluarga Suharto. Ada kasus pelanggaran HAM dan pelanggaran Amdal yang menyebabkan kerusakan lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk masyarakat Serangan, yang merupakan *wong cilik* dalam skema besar Suharto. Akhirnya, proyek juga ‘turun’ seperti Suharto dan keluarganya pada tahun 1998.

Namun, seperti keadaan Indonesia yang masih penuh ketidakpastian selama era reformasi ini, keadaan untuk masyarakat Serangan juga tidak meningkat. Kerusakan lingkungan sekitar Pulau Serangan yang diakibatkan pengerukan dan penimbunan BTID yang kebanyakannya tidak sesuai Amdal, menyebabkan kehilangan mata

---

<sup>112</sup> Wayan Patut, 25/9/02.

<sup>113</sup> Wayan Darta, 23/9/02.

<sup>114</sup> “Warga Serangan Tuntut Pemprov Kembalikan Tanahnya”, Nusa Tenggara, 30/1/01.

<sup>115</sup> Made Mangku, 12/9/02.

pencaharian untuk 85% penduduk yang merupakan nelayan pesisir. Pemilik tanah mengalami kerugian karena tanahnya dibebaskan secara terpaksa dengan ganti rugi tidak sesuai yang nanti hilang ketika bank-bank terkena likuidasi. 'Kain sosial' telah berubah, dengan gangguan terhadap kesucian pura dan lahannya, perubahan budaya pesisir, dan munculnya konflik dalam masyarakat. Akhirnya, penduduk Serangan mengalami kerugian besar, akibat kehilangan mata pencaharian utama sebagai nelayan pesisir, yang tidak digantirugikan secara moneter atau oleh jalan penyeberangan yang kononnya membuka kesempatan pekerjaan di daratan Bali. Permasalahan ini berlangsung, walaupun proyek BTID berhenti.

Sekarang, kebanyakan lahan Pulau Serangan 'kosong' – BTID menunggu investor, dan masyarakat menunggu BTID. Solusi harus ditemui supaya permasalahan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang diakibatkan proyek BTID bisa dihentikan. Berbagai solusi telah diajukan, tetapi pada dasarnya pihak BTID, yang dulunya menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakat Serangan, seharusnya bertanggungjawab kalau proyeknya dilanjutkan atau tidak dilanjutkan, karena bagaimanapun pihak BTID yang menyebabkan masyarakat kesusahan didalam memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat Serangan harus diperankan dulu. Sebenarnya, warga Serangan masih menginginkan proyek BTID bisa dilanjutkan pada pulaunya, dengan harapan proyek itu akan memberi keuntungan dan kesejahteraan. Solusi harus ditemui supaya Pulau Serangan, yang sudah dijadikan 'bubur', bisa dikasih 'gula' supaya kehidupan masyarakat Serangan lebih 'enak'.

---

<sup>116</sup> Patut, W., 21 Juni 2002. "Konsep Kemitraan Pilar Pelestarian dan Pengembangan Pulau Serangan". F-PeperMas, Pulau Serangan, Bali.

## DAFTAR PUSTAKA

### Wawancara

Dr. I Made Mangku  
Kantor Sekretariat Kerja Penyelamat dan Pelestarian Lingkungan Hidup, Sanur  
9/8/02, 12/9/02, 17/9/02.

Dr. Carol Warren, Murdoch University  
Sanur, 21/8/02; Murdoch University, Perth, 16/10/02, 12/11/02.

Wayan Patut  
Pulau Serangan, 14/9/02, 15/9/02, 23/9/02, 25/9/02.

Arya Widana  
Pulau Serangan, 15/9/02.

Ibu Mary, Ibu Mini dan Ibu Yogi, Kelompok Pedagang Pantai Timur  
Pantai Timur, Pulau Serangan, 15/9/02.

Bapak Bawa, Mantan Wakil Bendesa Adat  
Pulau Serangan, 23/9/02.

Bapak Made  
Pulau Serangan, 23/9/02.

Mas Made  
Pulau Serangan, 23/9/02.

I Wayan Darta, Lurah Serangan  
Kantor Kelurahan Serangan, 23/9/02.

Wayan Losmen  
Pulau Serangan, 23/9/02.

Pak Rontang  
Pulau Serangan, 24/9/02.

Made Sugita, Assisten Ketua Kelompok Nelayan Mina Cipta Karya II  
Pulau Serangan, 24/9/02.

Made Karsa, Kepala Lingkungan Banjar Dukuh  
Pulau Serangan, 24/9/02.

Bapak Kari, Ketua Kelompok Nelayan Mina Cipta Karya II  
Pulau Serangan, 25/9/02.

Wayan Kondra, Pemangku  
Pura Sakenan, 25/9/02.

Bapak dan Ibu Mini  
Pulau Serangan, 26/9/02.

I Wayan Raga, Bendesa Adat Serangan  
PT. Cipta Taman Penyu, Pulau Serangan, 25/9/02.

Icha, Turtle Campaign Team, WWF Indonesia Wallacea Program  
Email pribadi – 2/11/02

Windy, biologis marin di Yayasan Bahtera Nusantara, Denpasar  
Email pribadi – 20/2/03.

## Literatur

Aditjondro, G. 1995. Bali, Jakarta's Colony: Social and Ecological Impacts of Jakarta-Based Conglomerates in Bali's Tourism Industry. Working Paper No. 58, Asia Research Centre on Social, Political and Economic Change, Murdoch University, Perth.

Biro Pusat Statistik, 1995. Statistik Dalam 50 Tahun Indonesia Merdeka. Jakarta: BPS.

Hirsch, P. dan Warren, C. (Eds.) 1998. The Politics of Environment in SE Asia: Resources and Resistance. London: Routledge.

Putra, K. S. 1992. The Impact of Coral Mining on Coral Reef Condition in the East and South Coast of Bali Indonesia. Centre for Tropical Coastal Management, Department of Marine Science and Coastal Management, University of Newcastle Upon Tyne.

Martopo, S. dan Mitchell, B. 1995. Bali: Balancing Environment, Economy and Culture. Ontario, Canada: University of Waterloo Department of Geography Publication Series.

Robinson, G. 1995. The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali. Ithaca, USA: Cornell University Press.

Warren, C. 1995. Adat and Dinas: Balinese Communities in the Indonesian State. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

## Artikel-Artikel Surat Kabar:

"Kisah Duka Dari Pulau Serangan: Pan Lobeng Kelaparan Kalau Tidak Ngebon", Bali Post, 26/9/97.

"Setra Diincar Investor, Warga Serangan Protes", Nusa Tenggara, 11/10/97.

"Arsana Dukung Gerakan Pemuda Serangan", Bali Post, 16/7/98.

"SKPPLH Khawatirkan Pengembangan Rumput Laut di Pulau Serangan", Nusa Tenggara, 16/7/98.

"NBR dan BTID Langgar Amdal", Bali Post, 7/8/98

"Arsana: Sedang Negosiasi", Bali Post, 25/8/98.

"Lurah Serangan Dituntut Mundur", Bali Post, 27/8/98.

"Marak, Pengambilan Batu Karang Di Pulau Serangan", Nusa Tenggara, 2/9/98.

"Hendro Tak Berani Beri Kepastian", Bali Post, 16/9/98



- “Bongkar Reklamasi atau Ganti Bupati dan DPRD”, Nusa Tenggara, 20/3/00.
- “Ancaman Lingkungan pada Proyek BTID” (Surat Pembaca), Bali Post, 25/3/00.
- “DPRD Bali Bentuk Pansus Evaluasi Proyek BTID”, Nusa Tenggara, 13/4/00.
- “Pembuat Amdal Harus Bertanggungjawab”, Bali Post, 6/5/00.
- “Jembatan BTID Diusulkan 200 Meter”, DenPost, 6/5/00.
- “Jangan Korbankan Bali Untuk Pariwisata”, DenPost, 26/6/00.
- “Hutan Bakau Suwung Diserobot 26 Lembaga”, Bali Post, 8/7/00.
- “Keluarga Cendana Diminta Melepas Saham”, Tempo, 11/7/00.
- “Pansus BTID Gelar Dialog, Warga Ingin Proyek Dilanjutkan”, Denpost, 15/7/00.
- “Nasib Warga Serangan Makin Tak Jelas”, Suluh Rakyat, Edisi 4 Th.I / 20-27 Juli 2000.
- “Proyek BTID Perlu Dikaji Ulang”, Bali Post, 26/9/00.
- “Kodam IX/Udayana tak Pernah Ikut Campur”, DenPost, 5/1/01.
- “Reklaiming Lahan BTID Dipersoalkan”, DenPost, 12/1/01.
- “Lagi, FPAMS Perjuangkan Reklaiming Serangan”, Nusa Tenggara, 19/1/01.
- “Warga Serangan Tuntut Pemprov Kembalikan Tanahnya”, Nusa Tenggara, 30/1/01.
- “Enam Warga Serangan Ancam Laporkan BTID ke Polisi”, DenPost, 7/4/01.
- “Merasa Ditipu, BTID Dilaporkan ke Polda”, Radar Bali, 7/4/01.
- “Warga Serangan Ancam Laporkan PT BTID ke Polisi”, Nusa Tenggara, 7/4/01.
- “Akhirnya, DPRD Bali Keluarkan Rekomendasi”, Bali Post, 17/5/01.
- “Pengacara F-Pepermas akan Menghadap Panglima”, Sinar Bali, 27-29 Juli 2001.

### **Dokumen Lain**

Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Denpasar, 25 Agustus 2000. Surat 550.2.61-1369-DPS. Kepada: Ketua Panitia Khusus Evaluasi Proyek PT. BTID, Perihal: data-data perolehan tanah oleh PT. BTID di wilayah Kelurahan Serangan. Denpasar, Bali.

Divisi Tanah dan Lingkungan Lembaga Bantuan Hukum Bali, 30 Juni 2000. “Laporan Kegiatan Diskusi Pengungkapan Kasus Pembebasan Tanah oleh Kodam Udayana di Pulau Serangan di LBH Bali Tanggal 27 Juni 2000”. Denpasar, Bali.

Komando Daerah Militer IX Udayana, Januari 1990. “Pokok-Pokok Pikiran Proyek Pelestarian dan Pengembangan Pariwisata Pulau Serangan”. Denpasar, Bali.

- Lembaga Penelitian Universitas Udayana, 1995. "Analisis Dampak Lingkungan Pengembangan Pulau Serangan Kelurahan Serangan, Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar". Denpasar, Bali.
- LeProvost Dames and Moore, Agustus 1994. "PT. Bali Turtle Island Development Serangan Island Feasibility Study Internal Assessment of Concept Plan 3C". Perth, Australia.
- Menteri Kehutanan Republik Indonesia, 12 Agustus 1997. Surat 904/MENHUT\_II/97. Kepada: Kantor Wilayah Departmen Kehutanan Propinsi Bali, Perihal: Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Seluas 80,14 ha untuk Pengembangan Pariwisata atas nama PT. BTID. Jakarta.
- Monografi Kelurahan Serangan, Agustus 2002.
- Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, 8 Agustus 1990. Surat 02/PLH/15.75/Bd/1990 – "Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Atas Tanah, Tanaman dan Bangunan Yang Ada Diatasnya Beserta Daftar Lampiran dan Juga Merupakan Daftar Pembayaran Ganti Ruginya yang Terkena Lokasi Pengembangan Obyek Pariwisata Oleh Komando Daerah Militer IX Udayana Terletak Di Pulau Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali".
- Patut, W., 21 Juli 2002. "Konsep Kemitraan Pilar Pelestarian dan Pengembangan Pulau Serangan". Forum Pemulihan Pertiwi Masyarakat Serangan (F-Pepermas), Pulau Serangan, Bali.
- 5 Januari 2001. "Usulan Program Pemulihan Lingkungan Melalui Pengembangan Tanaman Produktif dan Tanaman Penghijauan". F-Pepermas, Pulau Serangan, Bali.
- Patut, W., Manik, T.A., Triyanto, B., 28 Juni 2001. "Kronologis Kasus Pulau Serangan". Denpasar, Bali.
- "Perjanjian Antara PT. Bali Turtle Island Development Dengan Masyarakat Kelurahan Serangan", Nomor 046/BTID-MOU/1998, 14 Oktober 1998.
- PT. Bali Turtle Island Development, Juni 2000. "Executive Summary".
- 22 Maret 2000. Surat BTID 141/BTID-1/Dirut-BG/2. Kepada Gubernur Bali, Perihal: Realisasi Pembangunan Jembatan ke Pulau Serangan. Jakarta.
- 4 September 1998. "Presentasi di Rapat Pembahasan Pelaksanaan Amdal Pengembangan Pulau Serangan". Kantor Bappeda Kodya Denpasar, Bali.
- Raga, W., Pebruari 2002. "Proposal PT. Citra Taman Penyu Kelurahan Serangan Kodya Denpasar Propinsi Bali". Denpasar, Bali.
- Vickers, A. dan Suwitha, P. G., 1992. "Serangan Island and Benoa Bay: A Cultural, Social and Economic Description". Illawara Technology Corporation, University of Wollongong, Australia.

**Dokumen Pemerintah:**

PP No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Pedoman Pelaksanaannya.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.